

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL DALAM PASAL 90 UU NO. 8
TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**

(Studi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh :

NOVINDRY DIAN ANGGRAINI

NPM : 1521020052

Jurusan: Siyasah (Hukum Tata Negara)



FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H / 2019 M

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL DALAM PASAL 90 UU NO. 8
TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**

(Studi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh :

NOVINDRY DIAN ANGGRAINI

NPM : 1521020052

Jurusan: Siyasah (Hukum Tata Negara)



Pembimbing I : Dr.Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

Pembimbing II : Dr. Jayusman, M.Ag.

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1440 H / 2019 M

ABSTRAK

Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, dan mental. Penyandang disabilitas yang ada di Kota Bandar Lampung merupakan salah satu masalah sosial yang terjadi pada masyarakat saat ini yang disebabkan oleh keterbatasan untuk melakukan suatu hal sehingga mempengaruhi faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Dalam Pasal 90 UU No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah: Bagaimana pelaksanaan Pasal 90 UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Kota Bandar Lampung dan Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Pasal 90 tentang Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung. Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini yaitu sesuai dengan rumusan masalah di atas fenomena tersebut.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Pengolahan data dengan menggunakan populasi dan sampel, Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa proses penyaluran bantuan jaminan sosial oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung belum optimal dikarenakan penyandang disabilitas yang semestinya menerima bantuan program bantuan jaminan sosial yang diberikan pemerintah ini banyak yang tidak tersalurkan langsung kepada penyandang disabilitas yang berhak menerimanya yang disebabkan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. Hukum Islam juga menjelaskan Allah melarang manusia untuk membedakan antara sesama manusia latar belakang, pendidikan, ataupun fisik seseorang, tetapi yang membedakan hanya aspek ketakwaan maka Allah menyukai orang yang berlaku adil yang disebutkan dalam Q.S An-Nissa 58.

Kepada Kepala Dinas Sosial dan Staff Dinas Sosial Kota Bandar Lampung seharusnya lebih tegas dalam menindak hal memberikan bantuan jaminan sosial dan lebih mensosialisasikan kepada penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas tahu adanya bantuan untuk mereka, dan kepada penyandang disabilitas seharusnya melaporkan bahwa data mereka telah terdaftar namun tidak menerima bantuan jaminan sosial yang diberikan pemerintah agar Dinas Sosial Kota Bandar Lampung lebih optimal dalam menjalankan tugasnya.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul : ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JAMINAN
SOSIAL DALAM PASAL 90 UU NO. 8 TAHUN
2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
(Studi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)

Nama : Novindry Dian Anggraini

NPM : 1521020052

Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di munaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung

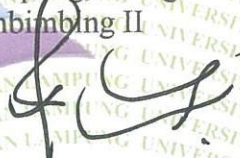
Bandar Lampung, 08 Agustus 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.

NIP. 196305271992032002


Dr. Jayusman, M.Ag.

NIP. 197411062000031002

Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah


Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

NIP. 197111061998032005

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat”*

(Q.S. An-Nissa (4) : 58)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

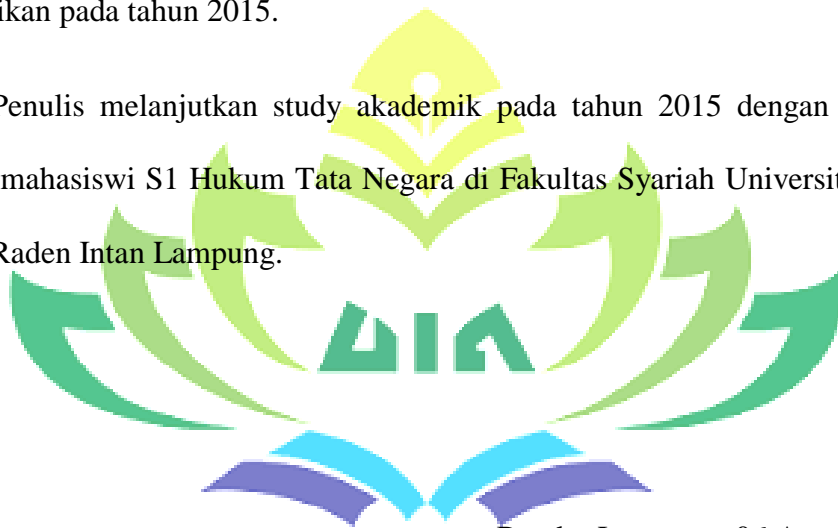
1. Kedua orang tuaku tercinta Papa Misdan dan Mama Yusnita yang telah sabar membesarkanku, mendoakanku, mendidikku, dan selalu mendukungku sejak dari kandungan hingga dewasa seperti ini. Berkat doa keduanyalah sehingga dapat menyelesaikan kuliah ini.
2. Adikku Anggita Septia Maharani yang selalu aku sayangi semoga gelar yang aku dapat sekarang dengan usaha yang telah aku lakukan menjadi motivasi bagimu supaya bisa terus melanjutkan pendidikan dan mengejar cita-cita.
3. Pembimbing I Ibu Dr.Hj.Zuhraeni, S.H., M.H., dan pembimbing II Bapak Dr.Jayusman, M.Ag yang telah banyak berkontribusi membimbing dan memberi pengarahannya dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Saudaraku Nimayang Satiani dan Dinda Meylanda terimakasih atas motivasi yang selalu kalian berikan dan selalu mendoakanku yang terbaik.
5. Sahabatku Yuli Andini, yang menemani keseharianku dari awal kuliah hingga saat ini baik susah maupun senang.
6. Jurusan Siyasah khususnya kelas (B), Kalianlah yang membuat kenangan indah semasa kuliah di Universitas Raden Intan Lampung.
7. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Raden Intan Lampung

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Novindry Dian Anggraini, Penulis dilahirkan di Prokimal pada tanggal 18 November 1997, Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Misdan dan Ibu Yusnita.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Dharma Wanita Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2003, setelah itu penulis melanjutkan studi di SD Negeri 1 kelapa tujuh Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2009, kemudian melanjutkan studi di MTS Negeri 2 Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2012, dan melanjutkan SMA Negeri 3 Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2015.

Penulis melanjutkan study akademik pada tahun 2015 dengan terdaftar sebagai mahasiswi S1 Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 06 Agustus 2019

Yang membuat,

Novindry Dian Anggraini

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Kuasa telah memberikan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Siyasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Para Sahabat, Keluarga dan Pengikutnya.

Penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, serta dengan tidak mengurangi rasa terimakasih atas bantuan atas semua pihak, rasa hormat dan trimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr.H. Khairuddin, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr.Nurnazli, SH, S.Ag. M.H selaku ketua jurusan siyasah dan Frenki, S.E.I., M.Si. selaku sekertaris jurusan, terimakasih atas dorongan dan bantuannya selama penyusunan skripsi ini.
3. Dr.Hj.Zuhraini, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, dan Dr.Jayusman, M.Ag selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan memberikan bimbingan dengan ikhlas dan sabar yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memotivasi penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh staf dan karyawan tata usaha Fakultas Syariah, perpustakaan fakultas syariah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan fasilitas dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung terimakasih telah memberikan bantuan dan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil sehingga terselesaikan skripsi ini

Semoga Allah membalas jasa dan budi baik kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Penulis sadar bahwa skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, mengingat kemampuan yang terbatas. Untuk ini kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-sarannya serta kritikan sehingga penelitian ini akan lebih baik.

Penuli berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 06 Agustus 2019

NOVINDRY DIAN ANGGRAINI

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
G. Signifikasi Penelitian	9
H. Metode Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori	
1. Jaminan Sosial	15
2. Penyandang Disabilitas	32
3. Jaminan Sosial Untuk Penyandang Disabilitas Persfektif Hukum Positif	38
4. Jaminan Sosial Untuk Penyandang Disabilitas Persfektif Hukum Islam	41
B. Tinjauan Pustaka	48
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	
1. Sejarah Berdirinya Dinas Sosial	51
2. Visi dan Misi Dinas Sosial	56
3. Struktur Dinas Sosial	57
B. Gambaran Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung.....	59
C. Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun.....	64
D. Pelaksanaan Jaminan Sosial di Kota Bandar Lampung.....	73
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Pelaksanaan Tugas Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Menyelenggarakan Jaminan Sosial	80
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Rekomendasi.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto-Foto Dokumentasi

Lampiran 2 Surat Penelitian KESBANGPOL kota Bandar Lampung

Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian Dinas Sosial Kota Bandar Lampung



DAFTAR TABEL

Tabel

1. Jumlah Penyandang Disabilitas Tahun 2017	61
2. Jumlah Penyandang Disabilitas Tahun 2018	62
3. Jumlah Penyandang Disabilitas Tahun 2019	63
4. Jumlah Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan 2017-2019	68
5. Jumlah Penyandang Disabilitas yang Menerima Bantuan Program Keluarga Harapan di Kota Bandar Lampung Tahun 2019	69
6. Jumlah Kelamin Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Kota Bandar Lampung	70
7. Daftar Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Kemiling	74
8. Daftar Tempat Tinggal Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Kemiling	75
9. Jenis Penyandang Disabilitas yang Menerima Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Kemiling	76
10. Pekerjaan Penyandang Disabilitas penerima Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Kemiling	77
11. Penerimaan Bantuan Program Keluarga Harapan sejak Tahun Berapa Hingga Tahun Berapa	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi ini. skripsi ini berjudul **“Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” (Studi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)**”. Berangkat dari judul tersebut diatas maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut:

1. Analisis adalah memperkirakan atau besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan suatu kerja dan terhadap suatu kejadian lainnya. Kejadian yang dapat dinyatakan sebagai perubahan nilai variabel.¹
2. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hokum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.²

¹M.IqbalHasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Grala Indonesia, 2002) h.97

²Abdoel Djamali R, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005) h.51

3. Hukum Islam merupakan sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan merujuk kepada rujukan yang disepakati mayoritas umat muslim, yang mencakup dalam wilayah kajian dalam hukum Islam.³
4. Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.⁴
5. Jaminan Sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak⁵.
6. Penyandang Disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara efektif dengan warga Negara lainnya.⁶
7. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa:
 - (1) pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas.

³Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah, Vol.17 No.2 Tahun 2017, (Jambi: Universitas Batanghari, 2017), h.1

⁴*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta 2008)h.1098

⁵Bunjamin Najmi, *Apa Itu Jaminan Sosial*, <http://jamsostek.blogspot.co.id/2010/10/apa-itu-jaminan-sosial.html?m=> di akses pada 20 Januari 2019

⁶Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

(2) penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) rehabilitasi sosial,
- b) jaminan sosial,
- c) pemberdayaan sosial dan
- d) perlindungan sosial.⁷

Berdasarkan uraian diatas bahwa dapat disimpulkan adalah suatu penelitian yang mendalam untuk mengkaji dan mendalami tentang jaminan sosial untuk penyandang disabilitas dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa alasan dasar dalam memilih judul “Analisis hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”(Studi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung) adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas dan dilakukan penelitian, selain itu untuk mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, khususnya kepada penyandang disabilitas dalam perspektif hukum Islam.

⁷Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 90

2. Alasan Subjektif

- a. Pembahasan ini diangkat dikarenakan belum tercapainya hak-hak para penyandang disabilitas secara adil dan merata di Bandar Lampung, sehingga skripsi ini diharapkan dapat memberikan referensi dan masukan kepada instansi terkait untuk lebih mengedepankan kepentingan para penyandang disabilitas..
- b. Pembahasan ini sangat sesuai dengan keilmuan penulis sehingga memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan tentang permasalahan ini, khususnya terkait analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Jaminan Sosial dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Tidak ada yang lebih tinggi kesempurnaannya dari manusia kecuali Allah swt, meskipun sebagian manusia diciptakan dalam kondisi fisik yang kurang sempurna. Karena apapun yang sudah melekat dan terjadi pada manusia adalah pemberian Allah swt,⁸ Dengan kata lain bahwa semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama tidak ada perbedaan apapun antara latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakan di antara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya. Sebagaimana tercantum dalam Qs.

An-Nur:61

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا

⁸AkhmadSholeh, *Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksebelitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia*, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/palestrn/article/download/968/882>, diakses pada 20 Januari 2019

عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ

*“Tidak ada larangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian, dan rumah ibu kalian”*⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa secara eksplisit menegaskan kesetaraan terhadap penyandang disabilitas dan yang bukan penyandang disabilitas, bahwa mereka (penyandang disabilitas) harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi, penelantaran, pelecehan, kekerasan dan kejahatan dalam kehidupan sosial.¹⁰

Penyandang Disabilitas dapat dikategorikan sebagai kelompok minoritas yang rentan serta sangat dekat dengan perlakuan diskriminasi, tindakan diskriminasi baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya.¹¹ Secara mendasar Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan rakyat tanpa membedakan katagori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang termasuk dalam hal ini adalah penyandang disabilitas tuna netra di Kota Bandar Lampung.

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Quran, 2012), h.286

¹⁰Hafiz, *NU ONLINE*, <http://www.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas>, diakses pada 20 Januari 2019

¹¹*Pedoman Ilo tentang Pengelolaan Penyandang Disabilitas* https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---bangkok/---ilo-jakarta/documents/wcms_218055. diakses pada 20 Januari 2019

Untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut, pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung selaku penyelenggara Negara seharusnya perlu menentukan suatu perencanaan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di Kota Bandar Lampung khususnya dalam menjamin Jaminan Sosial.

Dalam pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.¹² Dan dalam pasal 91 yang menyebutkan Jaminan Sosial dijelaskan lagi dalam pasal 93 sebagaimana yang dimaksud adalah:

1. Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk penyandang disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan
2. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
3. Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.¹³

91. ¹²Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal

93. ¹³Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal

Sejalan dengan hal tersebut diatas Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, untuk mendukung pelaksanaan pengembangan kesejahteraan sosial sebagai dasar hukum penyelenggaraan kesejahteraan sosial.¹⁴

Namun keadaan masyarakat di Kota Bandar Lampung pada saat ini dirasakan masih sangat memprihatinkan di karenakan kurang optimal pelaksanaannya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Tuntutan akan hak dan diadakannya bantuan berkelanjutan bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra sudah diupayakan dan direalisasikan oleh pemerintah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, bantuan berkelanjutan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dengan memberikan bantuan berupa uang untuk orang yang tidak mampu atau orang yang tidak mempunyai penghasilan. Namun ternyata tidak semua orang yang tidak mampu atau orang yang tidak mempunyai penghasilan yang termasuk didalamnya adalah penyandang disabilitas masih banyak yang tidak mendapatkan bantuan berkelanjutan yang diadakan oleh pemerintah.

Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk menulis serta menganalisisnya dalam bentuk skripsi yang berjudul *“Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas” (Studi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung) ”*.

¹⁴Abdullah, *Kajian Tentang Peran Dinas Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Kementrian Sosial Republik Indonesia, 2010), h. 2

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini terfokus pada pelaksanaan jaminan sosial dalam Pasal 90 UU No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas (studi dinas sosial kota Bandar Lampung) , dan melihat analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan jaminan sosial dalam pasal 90 UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas (studi dinas sosial kota Bandar Lampung)

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik merumuskan 2 (dua) buah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui serta menganalisis mengenai pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam menyelenggarakan Jaminan Sosial dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- b) Untuk mengetahui serta menganalisis mengenai analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan Jaminan Sosial dalam Pasal 90 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

a) Dari Segi Teoretis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya terhadap ilmu Hukum Tata Negara terkait analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Jaminan Sosial dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

b) Dari segi praktis

Para praktisi hukum khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan wacana baru yang lebih baik dalam upaya mewujudkan nilai kepastian hukum, nilai kemanfaatan dan nilai keadilan dalam pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam menyelenggarakan Jaminan Sosial.

G. Signitasi Penelitian

Pentingnya penelitian ini dilakukan agar pelaksanaan jaminan sosial untuk penyandang disabilitas dapat terlaksa di Kota Bandar Lampung dan mampu memberikan analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap pelaksanaan jaminan Sosial dalam Pasal 90 UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung . Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan agar dapat memberi kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan analisis hukum

Islam pada pelaksanaan Jaminan Sosial terhadap penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung dan diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dalam menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh didalam lingkungan sosial.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan Penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk kancan kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungannya.¹⁵

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian suatu objek yang membuat deskriptif, gambaran secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, cirri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada.¹⁶

¹⁵Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negri Raden Intan Lampung, 2015) h.10

¹⁶Kaelan, M.S *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma 2005) h.58

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan secara langsung dari responden dan nara sumber tentang obyek yang diteliti¹⁷. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Dalam skripsi ini penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁸ Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*). studi kepustakaan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

¹⁷Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* . (Jakarta:Ghalia Indonesia 2002) hlm.82

¹⁸*Ibid*, h 58

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang penting dalam penelitian, tujuan penelitian adalah mengumpulkan data.¹⁹ Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpuluan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan cirri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode pengumpulan data:²⁰

a. Pengumpulan Data Primer

- 1) Observasi adalah suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlakukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan penelitian.
- 2) Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oelh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.²¹ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.
- 3) Dokumentasi adalah teknik data yangf tidak langsung ditunjukan pada subyek peniliti, namun dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, laporan notulen rapat yang ada dengan hubungannya dengan penelitian.²²

b. Pengumpulan Data Sekunder

¹⁹Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, catatan ke 14, (Bandung: Alfabeta 2009) h.402

²⁰Sujarweni V, Wiratna, *Metode Penelitian Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014) h.31

²¹*Ibid*, h.107

²²*ibid*. h.115

Pengumpulan data sekunder menggunakan cara yaitu mengadakan studi kepustakaan (*Library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukakan dengan cara membaca, mempelajari serta menalaah bahan-bahan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

4. Populasi dan Sempel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, lembaga, media dan sebagainya. Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian. Dalam skripsi ini populasinya yaitu penyelenggara bantuan jaminan sosial dan penyandang disabilitas dan penerima bantuan jaminan sosial.

b. Sempel

Sempel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Sempel yang digunakan adalah *purposive sampling*, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. *Purposive sampling* adalah peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Sempel yang digunakan

dalam penelitian ini anatara lain : Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung (1 orang), staf bidang Bantuan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung (4 orang), Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Jaminan Sosial (8 orang).

5. Analisis Data

Tujuan analisa data ini adalah untuk memperoleh pandangan-pandangan baru tentang Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”, dan selanjutnya memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam praktek.²³ Dalam menganalisa data penelitian ini dipergunakan metode analitis kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁴ Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

²³H.B. Sutopo, *Metode Penulisan Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta: UNS Press, 1998), h.37.

²⁴Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta:Rineke Cipta, 2000), h.15.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Jaminan Sosial

a. Jaminan Sosial Perspektif Hukum Positif

Sejarah pembentukan sistem jaminan sosial mengacu pada kaidah internasional dimasukkan dalam hukum nasional melalui amandemen terhadap UUD 1945, dengan memasukan kata jaminan sosial sebagai metode yang harus dikembangkan oleh negara pasca krisis ekonomi Indonesia. Dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (3) yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”²⁵ kemudian dalam pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan “negara mengembangkan sistem jaminan sosial Bagi seluruh rakyat dan memberdayakan rakyat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.²⁶

Jaminan sosial dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Negara) berakar pada sistem kapitalisme karena jaminan sosial diterjemahkan sebagai strategi penyediaan cadangan dana mengatasi resiko ekonomi yang timbul secara sistematis dalam siklus ekonomi kapitalisme (krisis). Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

²⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28

²⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34

Negara. Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Negara menyatakan “pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”.(2) “penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu”²⁷. Kemudian pasal 17 ayat (4) menyebutkan bahwa “ iuran program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah”.²⁸

Jaminan sosial merupakan bagian ruang lingkup dari kesejahteraan sosial, kesejahteraan sosial dalam Hukum Positif adalah suatu keadaan sejahtera yang penuh, baik jasmaniah, rohaniah, maupun sosial, dan bukan hanya perbaikan dari keburukan-keburukan sosial tertentu. Pengertian kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Bab 1 Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut: kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dalam Pasal 6 Tentang Kesejahteraan Sosial²⁹ ini meliputi, Rehabilitasi Sosial, Jaminan

²⁷ Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Negara Pasal 14

²⁸ Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Negara Pasal 17

²⁹ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 6

Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial³⁰. Jaminan Sosial secara etimologi terdiri atas dua kata yaitu jaminan dan sosial, jaminan merupakan tanggungan atas pinjaman yang diterima atau janji satu pihak untuk menanggung kewajiban pihak lain, sedangkan sosial adalah sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat atau rakyat. Kedua arti tersebut jika dianalogiskan pihak yang satu adalah Negara serta pihak yang lain adalah masyarakat, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang dalam suatu Negara wajib menyetorkan iuran kepada Negara secara kolektif dan universal guna menanggung dan menjamin kehidupan warganya yang membutuhkan.³¹

Dalam pasal 9 UU No 11 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa :

(1) Jaminan Sosial dimaksudkan untuk a.menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. b.menghargai pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya. (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan. (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.³²

³⁰ Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Amzah 2016) h.37

³¹ Nael Edwin Kiky Aprianto, *Konstruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto : 2017) diakses pada 23 Mei 2019. h.240

³² Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 9

Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menyatakan bahwa “asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya”. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa “asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah”. Dalam pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara menyebutkan “urusan sosial masuk dalam urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apabila diteliti lebih lanjut, sebenarnya pasal 17 ayat (4) undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Negara ini justru mendasari pemikirannya berdasarkan pasal 34 ayat (3) hasil amandemen yang ditambahkan (fasilitas) sosial dan lainnya. Untuk lebih menegaskan unsur-unsur yang menjadi tanggung jawab negara, bukan pada pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Perubahan ini didasarkan kepada meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara dibidang kesejahteraan sosial. Adanya ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang lebih mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.meningkatkan taraf hidup manusia dalam mengatasi ketelatar belakang, ketergantungan, ketelantaran.³³

³³Rudy Hendra Pakpahan, Jurnal *Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial* , 23 Juli 2012. [http://e-jurnal .peraturan.go.id/index.php/jli/article/](http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/)

Dalam pengertian jaminan sosial yang telah dijelaskan, Sentanao Kertonegoro mengelompokkan empat usaha dalam kegiatan jaminan sosial, usaha yang pertama yaitu:

1. usaha-usaha yang berupa pencegahan dan pengembangan, yaitu usaha-usaha dibidang kesehatan, keagamaan, keluarga berencana, pendidikan, bantuan hukum dan lain-lain yang dapat dikelompokkan dalam pelayan sosial.
2. usaha-usaha yang berupa pemulihan dan penyembuhan seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, penderita cacat dan berbagai ketunaan yang dapat disebut sebagai bantuan sosial.
3. usaha-usaha yang berupa pembinaan, dalam bentuk perbaikan gizi, perumahan, transmigrasi, koperasi, dan lain-lain yang dapat dikategorikan sebagai sarana sosial.
4. usaha-usaha dibidang perlindungan ketenagakerjaan yang khusus ditujukan untuk masyarakat tenaga kerja yang merupakan inti tenaga pembangunan dan selalu menghadapi risiko-risiko sosial ekonomis, yang digolongkan dalam asuransi sosial.³⁴

Dalam keempat usaha utama tersebut, kemudian oleh beliau diaplikasikan dalam berbagai sistem jaminan sosial untuk mengatasi risiko ekonomis. Sistem jaminan sosial tersebut yang berupa :

- a). pencegahan dan penanggulangan
- b). pelayanan dan tunjangan
- c). bantuan sosial dan asuransi sosial

d). asuransi komersial dan asuransi sosial

e). peranggaran dan pendanaan³⁵

Dalam penguraian selanjutnya, kelima cara mengatasi risiko tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pencegahan dan Penanggulangan

a. Pencegahan

Pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya akibat risiko ekonomis umumnya dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut :

1). Menjaga tingkat perekonomian yang tinggi. Artinya pemerintah

harus tetap menjaga tingkat perekonomian agar tetap stabil guna mempertahankan pendapatan perkapita penduduk, atau daya beli masyarakat. Dengan usaha ini setidaknya dapat mencegah akibat resiko ekonomis.

2). Meningkatkan keterampilan, keahlian, motivasi dan produktivitas perorangan yang dalam bidang ketanagakerjaan cara ini termasuk pembinaan keahlian dan kejujuran tenaga kerja atau pelatihan kerja.³⁶

b. Penanggulangan

Pencegahan terhadap resiko ekomis dengan cara dalam poin 1 dan poin 2 tidaklah selalu berhasil dengan memuaskan. Karena yang namanya ketidakpastian murni semuanya tidak pasti, resiko yang bias saja datang dengan sendirinya meskipun sudah ada

³⁵ *Ibid*, h.27

³⁶ *Ibid*, h.29

pencegahan. Oleh karena itu disamping upaya pencegahan diperlukan lagi upaya lain yang disebut dengan penanggulangan.

Penanggulangan dapat berupa penggantian terhadap biaya yang dikeluarkan atau penghasilan yang terputus. Penggantian ini dapat berupa pembayaran tunjangan, biaya pengobatan, dan pelayanan medis.

2. Pelayanan dan Tunjangan

Pelayanan dapat dilakukan dengan cara memberikan jasa-jasa dan barang, misalnya jasa pemeriksaan dokter, perawatan rumah sakit, pemberian obat-obatan ataupun alat-alat pengganti atau alat bantu dalam hal ada fisik yang cacat atau berkurang fungsinya. Sementara itu, tunjangan dilakukan dengan cara memberikan sejumlah uang tertentu untuk membayar jasa atau membeli barang yang diperlukan.

3. Bantuan Sosial dan Asuransi Sosial

Bantuan sosial merupakan usaha mengatasi resiko ekonomis yang bersifat fundamental melalui pendanaan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dikatakan bersifat fundamental karena resiko-resiko yang dicoba untuk diatasi melalui bantuan sosial ini adalah resiko yang dirasakan oleh masyarakat umum, seperti bencana alam, kelaparan, dan sebagainya.

Sifat pokok bantuan sosial ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. tidak ada iuran dari yang bersangkutan (masyarakat)
- b. tidak terbentuk dana karena pembiayaannya selalu dibebankan kepada anggaran pemerintah.

c. pemerintah jaminan diberikan sesuai dengan kebutuhan.³⁷

Sementara itu sifat pokok asuransi sosial pada prinsipnya adalah merupakan suatu usaha untuk mengatasi resiko ekonomis dengan caramemperalihkan resiko tersebut kepada suatu perusahaan asuransi sosial. Dengan demikian jika seorang mengalami resiko, tanggung jawab untuk mengatasinya atau setidaknya-tidaknya untuk mengurangi akibat resiko tersebut beralih pada perusahaan asuransi.

4. Asuransi Komersial dan Asuransi Sosial

Selain dengan bantuan sosial atau dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penanggulangan resiko ekonomis juga bias dilakukan oleh yang bersangkutan dengan asuransi komersial. Perusahaan-perusahaan asuransi komersial. Perusahaan-perusahaan komersial umumnya diselenggarakan oleh badan usaha yang lebih meningkatkan profit/ keuntungan daripada tujuannya untuk mengatasi resiko ekonomis masyarakat atau tertanggung. Oleh karna itu diperlakukannya asuransi sosial.

5. Peranggaran dan Pendanaan

Penyelenggaraan program jaminan sosial sebagai salah satu usaha dalam mengatasi resiko dapat pula dilakukan melalui peranggaran (penyediaan anggaran) atau juga melalui pendanaan (pemupukan dana).

Dengan cara peranggaran, dananya akan berasal dari pemerintah yang besarnya disesuaikan dengan jumlah yang diperlakukan.

³⁷ *Ibid*, h.30

Sementara itu, dengan cara pendanaan, dananya akan berasal dari iuran peserta.³⁸

Jaminan Sosial diselenggarakan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim terlantar lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. jaminan sosial ini diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

Pada peraturan daerah provinsi lampung nomor 24 tahun 2014 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu dalam pasal 7 menyebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :

1. Rehabilitasi Sosial
2. Jaminan Sosial
3. Pemberdayaan Sosial, dan
4. Perlindungan Sosial³⁹

Dalam peraturan daerah provinsi lampung nomor 24 tahun 2014 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang membahas tentang jaminan sosial yaitu dalam pasal 9 yang berisi :

1. Jaminan Sosial adalah skema kelembagaan untuk menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
2. Jaminan Sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dimaksud untuk:

³⁸ *Ibid*, h.32

³⁹ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 7

- a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
3. jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.⁴⁰

Mendefinisikan istilah dari kesejahteraan sosial berkaitan erat dengan konteks kebudayaan dari orang-orang yang dibincang kesejahteraannya tersebut. Letaknya kesejahteraan sosial dengan konteks budaya mengandung arti bahwa kesejahteraan sosial bermakna sangat luas hamper tidak dapat didefinisikan dengan rinci. Oleh sebab itu luasnya cakupan dari kesejahteraan sosial, maka mendefinisikannya secara rinci tanpa mereduksi batas-batas konteksnya menjadi suatu hal yang mustahil. Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dapat ditafsirkan bahwa kebutuhan yang mutlak bagi setiap orang adalah makanan yang cukup, dalam arti cukup kalori dan cukup gizi. Dalam perkembangannya dia berusaha untuk mencukupi kebutuhan pokok lainnya, seperti sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya guna untuk

⁴⁰ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 9

memenuhi kesejahteraan sosialnya.⁴¹

b. Jaminan Sosial Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam adalah istilah khas dalam Bahasa Indonesia (Melayu) yang diterjemah kan dari *Islamic Law* (Inggris). Adapun istilah ini sendiri sering dilekatkan kepada istilah fiqh yang telah berevolusi dari ilmu secara umum menjadi ilmu yang dikhususkan tentang hukum-hukum dalam Islam. Namun demikian, belakangan ini istilah hukum Islam semakin sering digunakan khususnya ketika para orientalis.⁴²

Ahmad Zaki Yumani adalah menteri urusan minyak dan pertambangan kerajaan Arab Saudi, dalam salah satu karyanya mengupas masalah jaminan Sosial yang ditinjau dari segi Agama Islam yang dikemukakannya bahwa prinsip jaminan sosial telah ditetapkan sejak zaman Rasulullah.⁴³ Jaminan sosial dirumuskan dalam tiga hal, yaitu asas kemanusiaan asas manfaat, asas keadilan. Dalam hal ini asas kemanusiaan merupakan asas yang bersinggungan dengan martabat manusia. Asas tersebut untuk mengangkat dan melindungi harga diri manusia sebagai hak dasar bagi seluruh warga Negara. Sebagaimana yang terdapat dalam alquran bahwa adanya persamaan antar manusia di hadapan Allah, hanya saja yang membedakannya adalah ketakwaannya. Asas manfaat tercermin dengan pemberian nilai tunai dan pelayanan

⁴¹ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural* (Lantabora Press, Jakarta: 2005).h.160

⁴² Muhammad Jayus, *Jurnal Menggagas Arah Baru Studi Hukum Islam di Indonesia* (Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, Lampung : 2013) <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/Index.php/adalah/article/viewFile/274/434>, diakses 27 Agustus 2019

⁴³ A.Zaki Yumani , *Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini* (Jakarta: Lembaga Ilmu-ilmu studi Kemasyarakatan, 1977) h.74

kesehatan sesuai dengan kebutuhan pokok bagi kehidupan seorang yang layak, seperti sandang, pangan, papan, penjaminan pensiun, tabungan hari tua, kesehatan kecelakaan kerja, kematian, pendidikan, serta perumahan. Asas keadilan berarti jaminan yang didistribusikan adalah merata kepada seluruh warga negara dengan tidak memandang status, pangkat, jabatan, kaya maupun miskin, bahkan miskin sekalipun akan mendapatkannya perlakuan dan hak yang sama.⁴⁴

Dalam Islam adapun tiga strategi yang berbeda dan harus diaplikasikan ketika sebuah masyarakat secara menyeluruh ingin menikmati apa yang dimaksud dengan jaminan sosial. Yang *pertama* aspek pengaturan tentang kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial, dan pekerjaan sosial yang profesional dengan manajemen yang efektif dan efisien dalam penanganan masalah sosial. Secara umum, masyarakat yang dapat mengatur dan mengatasi masalah sosial. Secara umum, masyarakat yang dapat mengatur dan mengatasi masalah sosial memiliki kesejahteraan sosial yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang tidak dapat mengatur dan menghadapi masalah yang dihadapinya. Ketidak mampuan untuk mengatur masalah-masalah sosial melahirkan penyakit sosial. *Kedua* yaitu mendefinisikan nilai-nilai budaya dan agama serta faktor-faktor teknis yang mendorong dan menghambat suatu komunitas atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia berkenaan dengan kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial dan pekerjaan sosial dengan baik dan merata. Hanya saja

⁴⁴ Naerul Edwin Kiky Aprianto, *Konstruksi Sistem Jaminan Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto : 2017) diakses pada 23 Mei 2019

yang paling mendasar adalah mengevaluasi dan mengidentifikasi factor-faktor teknis dan factor-faktor budaya yang melahirkan kegagalan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan asasi raykat miskin berkenaan denga kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial, dan pekerjaan sosial yang baik dan merata. Budaya komsuntif, boros, dan pola hidup yang mubazir termasuk salah satu nilai budaya yang menghambat satu keluarga, kelompok atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan asasinya.⁴⁵

Pemerintah yang tidak bisa memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sosialnya dalam memenuhi kebutuhan asasi rakyat miskin , tentang kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial dan pekerjaan sosial dengan baik dan merata adalah pemerintah yang korup, zalim, tidak memiliki tanggung jawab dan tidak memiliki kepekaan sosial dalam memberikan pelayanan public kepada rakyat miskin. Mereka adalah para pejabat yang memposisikan dirinya sebagai kelompok elite yang berada dipuncak piramida sosial yang harus dilayani oleh rakyat dan senantiasa dalam posisi siap menerima upeti dari para bawahannya yang melayani kebutuhan asasi rakyat.

Ketiga, rakyat miskin yang belum merasakan kesejahteraan tidak seharusnya dijadikan objek layanan sosial secar terus menerus tanpa ada program pemberdayaan yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pemberdayaan menjadi akat kunci dalam mengatasi kemiskinan dengan pandangan yang santun

⁴⁵ Asep Usman Ismail, *Kesejahteraan Sosial Perspektif Alquran*. Diakses 18 Mei 2019. h.48

dan manusiawi, serta memandang mereka dalam perspektif kesetaraan dan kemitraan yang tulus. Filosofi yang harus dibangun dan disadari ketika kita terlibat dalam program pemberdayaan kaum dhu'afa adalah menolong mereka supaya mereka bias menolong dirinya sendiri. Indikator tingkat keberhasilan pemberdayaan yang pokok adalah munculnya kepercayaan diri orang-orang miskin bahwa mereka sanggup membuka mata untuk melihat peluang dan kesempatan guna meningkatkan taraf hidupnya dengan baik. Dengan demikian yang pertama dan utama dilakukan dalam menangani kemiskinan adalah menguatkan orang-orang miskin agar kepercayaan diri mereka tumbuh dengan mantap, baru kemudian diikuti dengan program pendampingan yang tulus dan berkesinambungan.⁴⁶

Dengan demikian ada beberapa alasan yang memperkuat perlu adanya pembangunan jaminan sosial dalam upaya kesejahteraan sosial dengan berbasis Alquran, yaitu sebagai berikut :

1. kaum muslimin yang merupakan penduduk terbesar negeri ini meyakini bahwa Alquran itu firman Allah yang merupakan buku petunjuk bagi manusia untuk menjalani hidup dan kehidupan yang baik. Jika dalam masalah sosial pembangunan kesejahteraan sosial seperti pengetahuan kualitas keluarga, perlindungan anak, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan kaum dhu'afa dan ketenagakerjaan tidak menjadi perhatian utama pemerintah serta tidak ada ketegasan dan keberanian dalam memerangi kebatilan ,

⁴⁶*Ibid.* h. 48

bahkan terus menerus mengabaikan pesan Alquran yang memwajibkan membela kaum lemah dan memihak kepada perlindungan orang miskin dari ancaman gurita kapitalis yang mematikan rakyat kecil dengan jarring-jaring sosial yang mengitari orang miskin.⁴⁷

2. Negeri ini sebuah negeri yang majemuk, didirikan oleh berbagai komponen bangsa, ibarat sebuah perusahaan kaum muslimin adalah pemilik saham terbesar. Oleh sebab itu, kaum muslimin memiliki tanggung jawab terbesar pula dalam membangun kesejahteraan bangsa ini. Ironisnya pemilik saham tersebut yang sekaligus penduduk terbesar negeri ini adalah bagian terbesar dari penduduk yang masih berada dibawah garis kemiskinan. Mereka belum menikmati kesejahteraan dalam usia negeri ini menjelang 66 tahun. Banyak hal yang menjadi factor penyebabnya, namun yang paling mendasar adalah kita belum sepenuhnya menggunakan konsep Alquran dalam membangun kesejahteraan sosial dinegeri mayoritas muslim ini.

3. Sumber dana untuk membiayai pembangunan kesejahteraan sosial dinegeri ini yang mayoritas muslim ini tidak mengandalkan dari Bank Dunia yang merupakan lembaga keuangan kapitalis, dan tidak juga datang dari bantuan asing. Tetapi, dengan menggalang dana dari potensi umat islam itu sendiri melalui zakat, infaq, dan shadaqah serta wakaf, sebagaimana dirintis oleh kelompok umat dengan

⁴⁷*Ibid.* h. 52

kelembagaan yang mandiri manajemen modern , serta didukung oleh manusia-manusia yang amanah dan professional.⁴⁸

Sumber utama Hukum Islam adalah alquran dan Sunnah , keduanya adalah acuan dalam menemukan dan penggalian hukum Islam guna menjawab segala problematika hukum yang timbul dimasyarakat. Yang didalamnya berkelindan baik antara interaksi sosial dalam kehidupan sosial dan kehidupan pribadi. Bila dilihat dalam alquran , nas kebanyakan bersifat kulliy dengan nilai-nilai Universal atau merupakan penjelasan yang sangat umum, kaidah-kaidah, serta filosofi yang bersifat umum yang menaungi syariat islam, maka Sunnah justru bersifat Juz'iy yang penjelasannya sangat terperinci terhadap hal-hal yang telah dijabarkan secara umum didalam alquran . meskipun dalam beberapa Sunnah dijelaskan ada Sunnah yang bersifat umum, Kaidah-kaidah yang bersifat umum dan filosofis yang bersifat filosofis umum.⁴⁹

Pandangan Ibnu Hazm terhadap Jaminan Sosial , ia memperluas jangkauan dan ruang lingkup kewajiban sosial lain, luar zakat, yang wajib dipenuhi oleh orang kaya sebagai bentuk kepedulian terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap orang fakir miskin, anak yatim dan orang-orang yang tidak mampu atau lemah ekonominya. Salah satu pandangannya yang menarik adalah masalah yang dewasa ini dikenal dengan pengentasan kemiskinan. Dalam kitabnya Al-Muhalla Ibnu Hazm memberikan statemen penting, orang-orang

⁴⁸ *Ibid*, h.53

⁴⁹ Asep Usman Ismail, *Kesejahteraan Sosial Perspektif Alquran*. Diakses 18 Mei 2019. h.40

kaya dari penduduk setiap negeri wajib menanggung kehidupan orang miskin diantara mereka, pemerintah harus memaksakan hal ini atas mereka, jika zakat dan harta kaum muslim tidak cukup untuk mengatasinya. Orang miskin itu harus diberi makanan dari bahan makanan yang semestinya, pakaian yang semestinya untuk musim dingin maupun musim panas..dan tempat tinggal yang dapat melindungi mereka dari hujan, panas matahari, dan pandangan orang-orang yang lalu lalang.⁵⁰

Adapun dasar dari pandangan ini sebenarnya ia sadarkan pada dalil alquran surat Al-Isra' ayat 26:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

“berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”

Adapun hak-hak yang diperintahkan oleh Allah untuk dipenuhi oleh Ibnu Hazm hal itu dipahami dengan yang tidak lain berupa pemenuhan fisik minimum manusia. Yang didalamnya adalah nilai-nilai kebutuhan manusia, meliputi pangan, sandang dan papan yang layak sesuai dengan harkat dan hajta hidup manusia , dan hal tersebut merupakan juga bagian dari Hak Asasi Manusia yang menjadi tanggung jawab sosial secara bersama dalam mewujudkan , demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh manusia, bahwa kita

⁵⁰ Atik Wartini, *Jurnal Jaminan Sosial dalam Pandangan Ibnu Hazm dan Relevasinya dengan Pengembangan Jaminan Sosial diIndonesia Vol 2*(Kajian Hukum Islam KMIP, Universitas Yogyakarta : 2014) diakses pada 20 Mei 2019. h.268

tahu sebuah⁵¹ kemiskinan bukanlah kehendak dari manusia. Orang miskin haruslah dibantu untuk membebaskan diri dari kemiskinan yang membelenggu dirinya.

Dalam hal ini bahwa Jaminan sosial menurut pandangan Ibnu Hazm mewajibkan bagi seluruh orang kaya yang ada dinegeri tersebut yang wajib menanggung kehidupan orang miskin⁵² , sedangkan jika kita lihat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang ada dinegara Indonesia itu dibiayai dan dipungut dari masyarakat dan untuk masyarakat. Bukankah masyarakat Indonesia ada banyak yang wajib menanggung orang miskin di Indonesia. Hubungan ini dapat mempererat ukhuwah antara yang miskin dan yang kaya.⁵³

2. Penyandang Disabilitas

a. Pengertian Penyandang Disabilitas

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 pasal 1 menegaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dimana berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka berdasarkan kesetaraan dengan masyarakat yang lainnya.⁵⁴ Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan seperti yang telah disebutkan diatas dan memiliki hambatan lantaran

⁵¹*Ibid.* h.269

⁵²*Ibid.* h.271

⁵³*Ibid.* h.273

⁵⁴Undang-Undang No 19 tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1

tidak dapat melakukan kegiatan secara layak. Penyandang Disabilitas tidak mampu untuk menjamin dirinya sendiri, seluruh, ataupun sebagian., kebutuhan individual normal dan kehidupan sosial, dikarenakan kecacatan mereka baik yang bersifat bawaan sejak lahir ataupun tidak, dalam hal kelakuan fisik atau mental.⁵⁵

Dalam hukum Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah *dzawil ahat ihtiyaj al-khasah* atau *dzawil adzar* orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai *uzur*.⁵⁶

Agama sebagai bagian dari sistem budaya memainkan peran penting dalam mengkonstruksikan pandangan masyarakat terhadap kelompok penyandang disabilitas. Bagaimanapun juga, pandangan masyarakat terhadap disabilitas pada akhirnya akan berujung pada layanan-layanan yang tersedia bagi kelompok penyandang disabilitas. Agama, dengan cara-cara mendasar mempengaruhi kesejahteraan sosial para penyandang disabilitas, terutama mereka yang hidup pada lingkungan dimana ajaran agama menempati posisi terhambata sebagai sumber nilai dan pedoman hidup. Sebagaimana yang dicatat oleh Vash, penyebaran dan penerapan doktrin agama mengenai disabilitas tampaknya tidak berpengaruh positif atas peningkatan kesejahteraan sosial dari penyandang disabilitas itu sendiri. Vash mencontohkan, anggapan bahwa yang terlahir cacat

⁵⁵Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbit (KDT) diakses pada 1 april 2019

⁵⁶Hafiz, *NU ONLINE*, Ahad, 19 November 2017 <http://www.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas>, diakses pada 15 Mei 2019, h. 1

merupakan bentuk hukuman dari tuhan atas perbuatan dosa tentu saja berpotensi menurunkan kepercayaan diri para penyandang disabilitas.⁵⁷

b. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Dalam membahas mengenai penyandang Disabilitas atau orang berkebutuhan khusus, tidak hanya berpaku pada keterbatasan fisik, namun juga ada jenis lain yang termasuk dalam penyandang disabilitas. Dalam BAB II Pasal 4 ayat 1 dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa ragam Penyandang Disabilitas, meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas Fisik
- b. Penyandang Disabilitas Intelektual
- c. Penyandang Disabilitas Mental, dan
- d. Penyandang Disabilitas Sensorik⁵⁸

Terdapat pula beberapa jenis penyandang disabilitas/kebutuhan khusus. Ini terlihat bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing dimana dari kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik.

Jenis-jenis penyandaang disabilitas :

1). Disabilitas Fisik :

1. Tuna Netra

Tuna Netra adalah hilang/kurangnya fungsi penglihatan

⁵⁷Miftahur Ridho, *Jurnal Pandangan Isam tentang Kesejahteraan Sosial bagi Kelompok Penyandang Disabilitas* (Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah IAIN Samarinda, Samarinda : 2017) diakses pada 20 Mei 2019. h.119

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan, maupun dikarenakan penyakit. Buta total, tidak dapat melihat sama sekali objek didepannya (hilangnya fungsi penglihatan), memiliki sisa penglihatan (low vision), seorang yang dapat melihat benda yang ada didepannya dan tidak dapat melihat benda dalam jarak satu meter.

2. Tuna Rungu Wicara

Tuna Rungu Wicara adalah kecacatan sebagai akibat hilangnya/ terganggunya fungsi pendengaran dan fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan, maupun penyakit. Jenis kecacatan ini terdiri dari tuna rungu wicara, tuna rungu, dan tuna wicara.

3. Tuna Daksa

Tuna Daksa adalah dapat diartikan sebagai sesuatu keadaan rusak atau terganggu, sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sifat sejak lahir.⁵⁹

2). Disabilitas Mental :

1. Tuna Laras

Tuna Laras yaitu seorang yang mengalami gangguan emosi, sukar mengendalikan emosi. Gangguan yang muncul

⁵⁹Oca Pawalin, *Peran Dinas Sosial Kota Metro dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas* (Universitas Lampung, Lampung : 2017) diakses pada 15 Mei 2019, h.39

pada individu yang berupa gangguan perilaku seperti suka menyakiti diri sendiri, suka menyerang teman, dan lainnya.

2. Tuna Grahita

Tuna Grahita yaitu sering dikenal dengan cacat mental yaitu kemampuan mental yang berada dibawah normal.

Dengan kata lain cacat pikiran, lemah daya tangkap.⁶⁰

3). Disabilitas Ganda

Disabilitas Ganda merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keterbatasan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna Grahita atau bahkan sekaligus.⁶¹

c. Hak Penyandang Disabilitas

Terkait dengan hak penyandang disabilitas, perlu diperhatikan tentang makna hak. Hak mulai menjadi perbincangan sering timbulnya negara-negara nasional yang mempersoalkan hubungan negara dan warga negara. Teori-teori yang berbasis pada hak memberikan justifikasi terhadap diutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan pribadi dari pada kepentingan masyarakat. Hukum dirancang untuk sebanyak mungkin melindungi kepentingan masyarakat. Hukum dirancang untuk sebanyak mungkin melindungi kepentingan individu sebagaimana yang dikemukakan Jeremy Bentham. Hak juga merupakan sesuatu hal yang tak terpisahkan dari hakekat kemanusiaan itu sendiri. Menurut Lord Lloyd of Hamstead

⁶⁰*Ibid.* h.40

⁶¹*Ibid.* h.41

dan M.D.A. Freenam terdapat dua teori hakikat dari hak, yaitu teori kehendak yang menitikberatkan kepada kehendak atau pilihan dan yang lain teori kepentingan atau teori kemanfaatan. Dan teori tersebut berkaitan dengan tujuan hukum.⁶²

Penyandang disabilitas mempunyai hak bagi penyandang disabilitas itu sendiri yang sudah diatur dalam BAB III dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas⁶³, yang menyatakan bahwa : (1)Penyandang Disabilitas memiliki hak: a.Hidup, b.bebas dari stigma, c.Privasi, d.keadilan dan perlindungan hukum, e.pendidikan, f.pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, g.kesehatan, h.politik, i.keagamaan, j.keolahragaan, k.kebudayaan dan pariwisata, l.kesejahteraan sosial, m.aksebilitasi, n.pelayanan publik, o.perlindungan dari bencana, p.habilitasi dan rehabilitasi, q.konsesi⁶⁴, r.pendataan, s.hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, t.berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, u.berpindah tempat dan kewarganegaraan, v.bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. (2)selain hak penyandang disabilitas sebagaimana yang dimaksud padaayat (1), perempuan disabilitas memiliki hak: a.atas kesehatan reproduksi, b.menerima atau menolak alat kontrasepsi, c.mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis, d.untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak

⁶²Aprilina Pawestri, *Jurnal Hak Penyandang Disabilitas Volume 2* (Universitas Sebelas Maret, Juni 2017) diakses pada 10 mei 2019

⁶³Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 5

⁶⁴*Ibid.* h.7

kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. (3) selain hak penyandang disabilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) anak penyandang disabilitas memiliki hak: a.mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual, b.mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal, c.dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan, d.perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, e.pemenuhan kebutuhan khusus, f.perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu, g.mendapatkan pendampingan sosial⁶⁵

3. Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas

a. Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas dalam Hukum Positif

Jaminan Sosial sering diartikan sebagai kesejahteraan sosial, istilah kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Dalam hal ini kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, pendapatan dapat terpenuhi, serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

⁶⁵*Ibid.* h. 9

a.Rehabilitasi Sosial b.Jaminan Sosial c.Pemberdayaan Sosial dan d.Perlindungan Sosial. Dimana dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa: (1) Jaminan Sosial dimaksudkan untuk a.menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. b.menghargai pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya. (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan. (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.⁶⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan dalam Pasal 91 yang berbunyi “pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dan disebutkan dalam Pasal 93 bahwa penyandang disabilitas berhak menerima jaminan sosial dalam bentuk, yaitu: (1)Jaminan Sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk penyandang disabilitas

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 6

yang miskin dan atau tidak mempunyai penghasilan. (2)jaminan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus. (3)bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.⁶⁷

Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, antara lain disebutkan dalam Pasal 42 dan 54.⁶⁸ Dalam Pasal 42 menyebutkan bahwa “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Sedangkan isi dari dalam Pasal 54 menyebutkan bahwa “setiap anak cacat fisik atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.⁶⁹

D.Dradjad dalam tulisannya mengenai “Jaminan Sosial di Indonesia” mengutarakan berbagai sistem dan program pemberian

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 91 dan Pasal 93

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁶⁹ Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

jaminan sosial diIndonesia, sebagai berikut: 1.Sistem dan program bantuan sosial yang diberikan berdasarkan keadaan sosial ekonomi dan kebutuhan orang yang menrimanya. Bantuan dalam bentuk keuangan atau badan itu diberikan kepada setiap individu atau keluarga yang berada dalam kesulitan hidup secara sosial ekonomi. 2.sistem pensiunan yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pensiunan diberikan kepada pegawai negeri sipil dan anggota angkatan bersenjata, atau kepala keluarga yang memenuhi persyaratan untuk itu. 3.sistem dan program asuransi yang dibayarkan kepada para nasabh yang berhak, berdasarkan peraturan asuransi yang ada. Hal ini hanya berlaku untuk orang-orang yang selama waktu tertentu membuat perjanjian dengan suatu perusahaan atau badan asuransi, dan telah membayar sejumlah uang sebagai kewajiban premi. Jaminan sosial yang dimaksud dalam program bantuan sosial ini yang berhak menerimanya adalah, fakir miskin, penyandang disabilitas, anak yatim terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan orang-orang yang mengalami masalah ketidakmampuan ekonomi.⁷⁰

b. Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas dalam Hukum Islam

Islam adalah agama yang kaya dengan peraturan-peraturan yang dapat menjamin kesejahteraan sosial. Dalam islam, Islam membenci adanya perbedaan yang mencolok dalam pakaian dan kemewahan, sebab hal demikian dapat menimbulkan rasa iri atau dengki, oleh

⁷⁰ D.Dradjad, *Jaminan Sosial diIndonesia* (Insani: Media Informasi dan Komunikasi Pekerjaan Sosial) h.15

karna itu Islam berupaya menyamakan jarak antara masyarakat yang kaya dan yang miskin. Cara yang ditempuh Islam dalam usahanya mendekatkatkan antara sikaya dan simiskin sangat menarik, terhadap orang kaya diharamkan hidup mewah. Allah telah melukiskan bahwa orang yang hidup mewah ialah yang lebih deluan menantang Rasulullah dan merekalah yang tamak terhadap harta benda yang fana. Adapun peran yang wajib dimainkan oleh orang-orang fakir ialah mempertinggi taraf hidupnya hingga dapat mempersempit jurang pemisah anantara kedua belah pihak . hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti tuntunan agama Islam yang mendorong orang-orang fakir bekerja dan berusaha mencari rezeki dengan ikhlas, tabah hati, dan giat.⁷¹

Sumber utama Hukum Islam adalah AlQuran dan Sunnah, keduanya adalah acuan dalam menemukan dan penggalian hukum islam guna menjawab segala problematika hukum yang timbul dimasyarakat. Yang didalamnya berkelindan baik antara interaksi sosial dalam kehidupan sosial dan kehidupan pribadi. Bila dilihat dalam alquran, nas kebanyakan bersifat kulliy dengan nilai-nilai universal atau merupakan penjelasan yang sangat umum, kaidah-kaidah, serta filosofi yang bersifat umum yang menaungi syariat Islam maka sunnah justru bersifat Juz'iy yang penjelasannya sangat terperinci terhadap hal-hal yang telah dijabarkan secara umum didalam alquran. Meskipun dalam beebrapa sunnah dijelaskan ada

⁷¹ Ahmad Syalaby, *Masyarakat Islam* (Jakarta: Jayamurni, 1961) h.50

sunnah yang bersifat umum, kaidah-kaidah yang bersifat umum, kaidah-kaidah yang bersifat umum dan filosofis yang bersifat umum.

72

Sebagai salah satu agama besar didunia , Islam memiliki tradisi yang telah berusia tua menyangkut pelayanan sosial bagi orang-orang cacat. Sepanjang sejarah Islam, tercatat sejumlah besar penyandang disabilitas yang menempati posisi penting dalam masyarakat. Perkembangan signifikan dapat dilacak pada abad ke-16 dan ke-17. Pada masa itu, kekhalifahan ottoman di turki telah mengakui bahasa tanda (*sign language*) sebagai salah satu bentuk komunikasi yang diterima secara resmi oleh kekhalifahan ketika itu. Perlu dicatat sebagai perbandingan, bahwa pada masa ini para ilmuwan eropa masih berdebat mengenai apakah seorang yang tuli dapat belajar sesuatu atau berfikir selayaknya makhluk rasional.⁷³

Pada ayat lain dalam Alquran secara jelas menyebut bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Interpretasi terhadap ayat ini berimplikasi pada salah satunya anggapan bahwa istilah “cacat” itu sendiri pada hakikatnya tidak berkorensipodensi dengan keadaan apapun dalam dunia nyata. Istilah cacat dengan kata lain adalah produk pemikiran manusia yang merendahkan harkat kemanusiaan dari ciptan Allah yang berbeda dengan kebanyakan ciptaan-Nya yang lain. Meski demikian, penafsiran yang demikian jelas tidak menyelesaikan masalah apapun

⁷² *Ibid*, h.121

⁷³ *Ibid*, h.123

yang dialami oleh penyandang disabilitas selain masalah spiritual tentunya.⁷⁴

Memiliki isu disabilitas dengan maksud mengambil hikmah (pelajaran) sepertinya lebih berguna dibandingkan dengan menolak eksistensi istilah tersebut. Hal ini karena, dengan dalil apapun, disabilitas disertai dengan sederet permasalahan kesejahteraan sosial yang mesti segera ditangani dengan memadai. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan semangat Alquran yang sarat dengan pesan-pesan kreatif bagi umat manusia. Manusia dalam perspektif ini diperintah untuk membuka segala bentuk kemungkinan yang berkaitan dengan rahasia alam semesta. Menemukan dan menciptakan teknologi-teknologi yang memudahkan hidup mereka. Menempatkan disabilitas sebagai ujian dari Allah kepada orang-orang yang secara prerogative dipih-Nya tentu dengan pertimbangan-pertimbangan ilahiyah yang tidak terjangkau akal insani, membuka peluang bagi setiap orang untuk dapat membincang disabilitas tanpa merasa canggung. Disabilitas dalam pengertian seperti ini lebih relevan jika dimasukkan ke depan diskursus mengenai peluang terjadinya kecacatan (baik sejak lahir ataupun karena penyakit ataupun karena kecelakaan) dari pada kajian-kajian moral-filosofis mengenai hakikat kesempurnaan untuk dihadapkan dengan kecacatan.

Bagaimanapun juga, melihat hakikat kesempurnaan dari perspektif alquran akan membawa kita pada kesimpulan bahwa kesempurnaan

⁷⁴*Ibid.* h.125

memang semata-mata merupakan sifat Allah, manusia sebaik fungsional apapun tubuh dan pikirannya tidak akan pernah mencapai derajat kesempurnaan. Perbincangan filosofis mengenai kesempurnaan dalam pandangan Islam guna menyimpulkan hakikat kecacatan pada dasarnya kurang berguna, karna bagaimanapun juga dapat dimaknai secara beragam tergantung dari objek yang dilekati oleh sempurna itu sendiri.⁷⁵

Dalam Alquran, Hadist, dan pendapat ulama secara tegas menyampaikan pembelaan terhadap penyandang disabilitas berhak menerima bantuan jaminan sosial seperti masyarakat umumnya tanpa perbedaan:

a) An-Nur ayat 61



لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا
عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
إِخْوَانِكُمْ

“tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian, atau rumah ibu kalian”

Ayat ini menjelaskan bahwa secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial.

⁷⁵Ibid. h.129

أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَالِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا
جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“subtaansi firman allah ta’ala adalah bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang punya uzur dan keterbatasan (tunanetra, orang pincang, atau sakit) untuk makan bersama orang-orang yang sehat (normal), sebab Allah membenci kesombongan dan orang-orang sombong dan menyukai kerendahan hati dari pada hambanya”

Bahkan dari penafsiran ini menjadi jelas bahwa Islam mengancam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. Terlebih diskriminasi yang berdasarkan kesombongan dan jauh dari akhlaqul karimah.

b) ‘Abasa ayat 1-11

عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهَ يَرْكَبُ ۚ أَوْ يَذَّكَّرُ
فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۚ أَمَّا مَنْ اسْتَعْزَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ
أَلَّا يَرْكَبُ ۚ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى

“dia (Muhammad) berwajalah masam dan berpaling. Karena seorang tuna netra telah datang kepadanya. Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali ia ingin menyucikan dirinya (dari dosa). Atau ia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy) maka engkau (Muhammad) memperhatikan mereka. Padahal tidak ada (cela) atasmukalau ia tidak menyucikan diri (beriman) adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran) sementara ia takut kepada allah, engkau (Muhammad) mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh (ayat-ayat/surat) itu adalah peringatan.”

Ulama mufasirin meriwayatkan, bahwa surat ‘Abasa turun berkaitan dengan salah seorang sahabat penyandang disabilitas,

yaitu Abullah bin Umri Maktum yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, untuk memohon bimbingan islam namun diabaikan. Kemudian turunlah surat ‘Abasa kepada beliau sebagai peringatan agar memperhatikannya, meskipun tunanetra. Bahkan beliau diharuskan lebih memperhatikannya dari pada pemuka Quraisy. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW sangat memuliakan dan bila menjumpainya langsung menyapa. Semakin jelas bahwa islam sangat memperhatikan penyandang disabilitas, menerimanya secara setara sebagaimana manusia lainnya bahkan memprioritaskan.⁷⁶

c) Hadist Abu Dawud

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونَ لَهُ الدَّرَجَةُ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَنْتَلِيهَا بِعَمَلٍ حَتَّى يُبْتَلَى بِبَلَاءٍ فِي جِسْمِهِ فَيَنْتَلِيَهَا بِذَلِكَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

“Rasulullah SAW bersabda, sungguh seseorang niscaya punya suatu derajat disisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal, sampai ia diuji dengan dengan cobaan dibadannya, lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut”

Hadist ini memberi pemahaman bahwa dibalik keterbatasan fisik (disabilitas) terdapat derajat yang mulia disisi Allah ta’ala.⁷⁷

d) Pendapat Iman Al-Qurthubi

كُلُّ كَانَ إِذَا وَالْعَبْدِ وَالْخَصِيِّ وَالْأَفْطَعِ وَالْأَشَلِّ وَالْأَعْرَجِ الْأَعْمَى بِإِمَامَةٍ بَأْسَ وَلَا
بِالصَّلَاةِ عَالِمًا مِنْهُمْ وَاجِدٍ

⁷⁶Hafiz, *Jurnal NU ONLINE*, Ahad, 19 November 2017
<http://www.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas>,
diakses pada 15 Mei 2019. h.2

⁷⁷*Ibid.* h.3

“Tunanetra, orang pincang, orang lumpuh, orang yang terputus tangannya, orang yang dikebiri, dan hamba sahaya tidak mengapa menjadi imam shalat bila masing-masing dari mereka mengetahui tatacara shalat”

Imam Al-Qurthubi dan para ulama lainnya tidak mempermasalahkan disabilitas semisal tunanetra, tunadaksa dan lain-lainnya boleh saja menjadi imam shalat asalkan mengetahui tatacaranya, hal ini niscayakan pengakuan Islam atas peran para penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial kemasyarakatan bahkan dalam peribadahan.

e) Pendapat Imam Ar-Ramli As-Shaghir

وَاشْتَرَا طُ الْعَبَّادِيَّ الْبَصَرَ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَا فِطْنَةَ مَعَهُ وَإِلَّا فَكَثِيرٌ
مِنَ الْعُمَيَّانِ أَعْرَفُ بِالْأُمُورِ وَأَدْفَعُ لِلنُّهْمِ وَالرَّيْبِ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْبُصَرَاءِ

“pengajuan syarat mahram yang menemani wanita saat berpergian oleh Al-Abbadi diserahkan dalam konteks orang yang tidak menyukai kecakapan, diluar konteks itu, maka banyak tunanetra yang lebih mengetahui berbagai permasalahan dan lebih mampu menolak kesalahpahaman dan praduga daripada orang-orang yang bias melihat”

Pendapat ulama ini terang-terangan dan mengapresiasi peran penyandang disabilitas dalam menjaga kehormatan dan keselamatan para mahram atau keluarganya.⁷⁸

B. Tinjauan Pustaka

Masalah mengenai jaminan sosial bukanlah hal yang baru, begitu juga masalah jaminan sosial untuk penyandang disabilitas, adapun beberapa penelitian yang mengangkat tentang jaminan sosial penyandang

⁷⁸Ibid. h. 30

disabilitas karena masih menjadi bahasan yang menarik untuk diteliti.

Adapun hasil dari skripsi Siti Munarofah menjelaskan bahwasannya Jaminan Sosial bagi Penyandang Disabilitas yaitu suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sistem jaminan sosial yang diberlakukan di Indonesia adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sistem Jaminan Sosial Nasioanal diselenggarakan berdasarkan Asas Kemanusiaan, Asas Manfaat, dan Asas Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan Sistem Jaminan Sosial ini bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap anggota keluarga.⁷⁹

Adapun hasil dari skripsi Oca Pawalin menjelaskan istilah penyandang disabilitas sering digunakan untuk menyebut sekelompok masyarakat yang memiliki gangguan mental, kelainan dan bahkan kehilangan fungsi organ tubuhnya. Penyandang disabilitas pada dasarnya bukanlah merupakan kaum minoritas dan wajib mendapatkan dan wajib mendapatkan perhatian yang sama dengan masyarakat normal lainnya.⁸⁰

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menyusun dan mengkaji, memiliki spesifikasi tersendiri dibandingkan penelitian-penelitian lain. Karya ini bisa jadi merupakan bentuk kelanjutan dan melengkapi karya-karya yang sudah ada. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah didalam penelitian ini secara khusus

⁷⁹ Siti Munarofah, *Implementasi Jaminan Sosial Bantuan Langsung Berkelanjutan Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman Bagi Disabilitas Berat* (Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga ,Yogaykarta : 2016)

⁸⁰ Oca Pawalin, *Peran Dinas Sosial Kota Metro dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas* (Universitas Lampung, Bandar Lampung : 2017)

menggunakan analisis Hukum Islam yang dikaji lebih mendalam.



BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Sejarah berdirinya dinas sosial Bandar Lampung tidak akan terlepas dari sejarah berdirinya Kota Bandar Lampung itu sendiri. Kota Bandar Lampung selain ibu Kota Bandar Lampung juga merupakan ibu kota Bandar Lampung. Provinsi Lampung dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 1964 Undang-undang nomor 14 tahun 1964. Sebelum menjadi provinsi Lampung , Lampung merupakan sesuatu keresidenan, sebagai tindak lanjut statusnya dizaman Hindia Belanda dahulu keresidenan lampung merupakan bagian dari provinsi Sumatera Selatan.⁸¹

Wilayah kota Bandar Lampung dizaman Hindia Belanda dahulu termasuk wilayah *onder afdeling*. Teluk Betung yang dibentuk dengan staatsbalat 1912 Nomor:462, terdiri dari ibu kota teluk betung sendiri dan daerah-daerah sekitarnya. Sebelum tahun 1912 ibu kota teluk betung ini meliputi juga keresidenan lampung, kedua kota tersebut tidak termasuk dalam marga verbal, melainkan berdiri sendiri yang dikepalai oleh seorang asisten dengan tunduk kepada *Hoof Van Plaatsyeek* yaitu kepala *Onder Afdeling* teluk betung. Biaya sehari-hari pemeliharaan kedua kota tersebut ditanggung oleh suatu dana yang disebut *Plaastleyk*

⁸¹ *Dokumentasi*, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dicatat tanggal 20 mei 2019.

Fonds. Pengelolaan keuangan diatur dalam keputusan residen Lampung tanggal 24 november 1930 nomor 169.⁸²

Sejak kemerdekaan Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1948, kota tanjung karang dan kota teluk betung berstatus kota kecil yang merupakan bagian dari kabupaten lampung selatan, wilayah sekitarnya dipisahkan dari wilayah onder afdeling teluk betung-tanjung karang berdasarkan undang-undang no 5 tahun 1956, kemudian pula berdasarkan undang-undang no 28 tahun 1959 nama kota besar tanjung karang- teluk betung dirubah menjadi kota praja tanjung karang-teluk betung yang didalamnya terapat 2 kecamatan yaitu kecamatan tanjung karang dan kecamatan teluk betung, dan sisa wilayah onder afdelingteluk betung dimasukan dalam wilayah kabupaten lampung selatan.⁸³

Setelah keresidenan lampung dinaikan statusnya menjadi provinsi lampung berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 1956 kota praja tanjung karang- teluk betung berubah menjadi kota tanjung karang-teluk betung . perbatasan kota madya tanjung karang- teluk betung ditentukan dalam undang-undang nomor 5 tahun 1956. Undang-undang nomor 28 tahun 1959 diDalamnya terdapat 4 kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan tanjung karang barat dengan pusat pemerintahannya dijalan bukit tinggi bambo kuning (kampung kaliawi)
2. Kecamatan tanjung karang timur dengan pusat pemerintahannya

⁸² *Dokumentasi*, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dicatat tanggal 20 mei 2019.

⁸³ *Dokumentasi*, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dicatat tanggal 20 mei 2019.

dijalan kampung sawah lama.

3. Kecamatan teluk betung utara dengan pusat pemerintahannya dijalan sumur batu.
4. Kecamatan teluk betung selatan dengan pusat pemerintahannya dijalan Mentawai teluk betung.⁸⁴

Berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1975 dan peraturan pemerintah no 3 tahun 1982 tentang batas perubahan wilayah kotamadya dari II Tanjung Karang- Teluk Betung yang mulai efektif terhitung sejak tanggal 8 Juni 1982, yaitu sejak diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan kepada Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat II Tanjung Karang – Teluk Betung diperluas dengan dimasukkannya wilayah kabupaten daerah tingkat II kabupaten Lampung Selatan yang meliputi 14 desa dari sebagian wilayah kecamatan Kedaton, 14 desa kecamatan Panjang.

Kemudian berdasarkan peraturan itu juga kecamatan-kecamatan dalam wilayah daerah tingkat II Tanjung Karang- Teluk Betung ditata kembali menjadi 9 kecamatan dengan 58 kelurahan. Selanjutnya berdasarkan surat Gubernur/KDH tingkat I Lampung nomor G/185.B111/HK/1988 Tanggal 6 Juni 1988 serta surat persetujuan MENDAGRI nomor 140/1799/PUOD Tanggal 9 Mei 1987 tentang pemekaran kelurahan diwilayah Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung terdiri dari 9 kecamatan dengan 84 kelurahan. Kemudian berdasarkan peraturan daerah Kota Bandar Lampung nomor

⁸⁴ Dokumentasi, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dicatat 10 Mei 2019.

4tahun 2001 tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kecamatan dan kelurahan dalam kota bandar lampung, maka kota bandar lampung menjadi 13 kecamatan dengan 98 kelurahan, yaitu : Kedaton, Tanjungkarang timur, Tanjungkarang barat, Tanjungkarang pusat, Sukarame, Telukbetung selatan, Telukbetung barat, Panjang, Kemiling, Rajabasa, Tanjung seneng, dan Sukabumi.

Kota Tanjung Karang Teluk Betung (Bandar Lampung) sebagai ibukota provinsi Lampung berdasarkan peraturan daerah kota madya daerah tingkat II Tanjung Karang Teluk Betung (Bandar Lampung) nomor 5 tahun 1983, tanggal 236 januari 1983 telah ditetapkan hari jadinya pada tanggal 17 juni 1982 dan sejak itu pula muncullah dinas-dinas yang menjadi struktur pemerintahan kota madya Tanjung Karang Teluk Betung (Bandar Lampung), termasuk pula dinas sosial provinsi Lampung.⁸⁵

Dinas sosial kota Bandar Lampung letaknya berada di jalan Panglima Polim No.1 Gedong Air, Bandar Lampung. Letaknya cukup strategis bersebelahan dengan jalan smaratulangi dan letak kantor mudah dijangkau dengan kendaraan angkutan umum maupun kendaraan pribadi. Dinas sosial kotamadya bandar lampung dan terbentuk berdasarkan peraturan nomor 24 tahun 1996 yaitu tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas sosial kotamadya bandar lampung. Dengan adanya aturan daerah berdasarkan peraturan dinas sosial kota bandar lampung no 12 tahun 2000 tentang Pembentukan

⁸⁵ Dokumentasi, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dicatat tanggal 20 mei 2019.

Negeri Daerah Kota Bandar Lampung adalah satuannya dibentuk dinas sosial dan pemberdayaan perempuan kota bandar lampung berdasarkan keputusan walikota bandar lampung no 15 tahun 2001 yang sudah direnovasi majelis keputusan walikota bandar lampung no 30 tahun 2000.

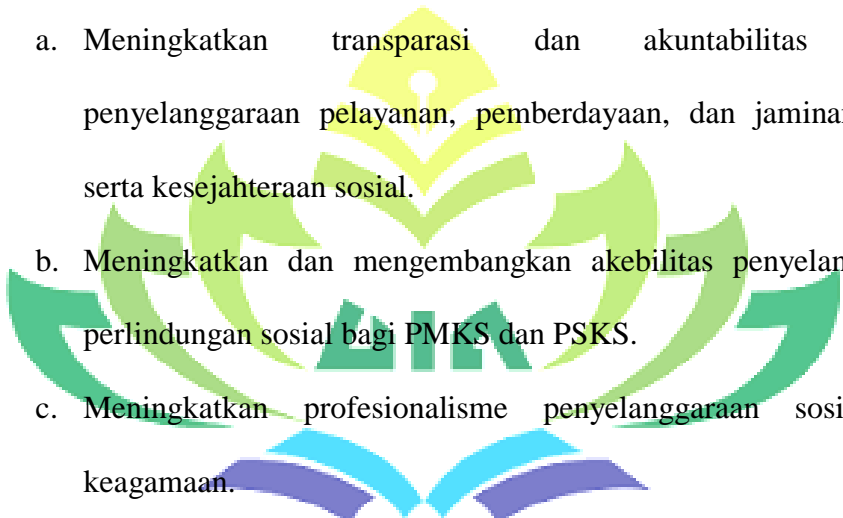
Berdasarkan peraturan daerah nomor 24 tahun 1996 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas sosial kota bandar lampung, telah berubah bentuk dan fungsinya untuk operasional pelaksanaan perda tersebut diatur rincian-rincian tugas masing-masing jabatan struktural dilingkungan dinas sosial kota bandar lampung. Berdasarkan keputusan walikota kepala daerah bandar lampung nomor 19 tahun 1998 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah kota bandar lampung nomor 24 tahun 1996 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas sosial kota bandar lampung.

Dengan adanya otonomi daerah sejak tahun 1999 berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diganti dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dinas sosial kota bandar lampung kemudian mengalami perubahan yaitu berdasarkan keputusan walikota bandar lampung nomor 30 tahun 2003 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas sosial kota bandar lampung.⁸⁶

⁸⁶ *Dokumentasi*, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dicatat tanggal 20 mei 2019.

2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Adapun Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, yaitu dinas sosial menetapkan visi bahwa “mewujudkan kesejahteraan sosial oleh dan untuk semua menuju keadilan sosial bagi masyarakat” Penjelasan makna visi dari dinas sosial yaitu penetapan visi ini telah menjadi komitmen bersama dari seluruh aparat dinas sosial kota Bandar Lampung yang hendak diperjuangkan untuk membantu pencapaian visi yang telah ditetapkan oleh kota Bandar Lampung, untuk mewujudkan visi tersebut maka misi dari dinas sosial kota Bandar Lampung itu sendiri adalah :

- 
- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan, dan jaminan sosial serta kesejahteraan sosial.
 - b. Meningkatkan dan mengembangkan akabilitas penyelenggaraan perlindungan sosial bagi PMKS dan PSKS.
 - c. Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan sosial dan keagamaan.
 - d. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiawanan sosial.⁸⁷

Adapun tujuan dinas sosial kota bandar lampung yaitu pembangunan kesejahteraan sosial dengan terwujudnya tata kehidupan dan penghidupan yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup, baik perorangan,

⁸⁷ Dokumentasi, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dicatat tanggal 20 mei 2019.

keluarga, kelompok, dan komunitas masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta nilai sosial budaya yang tercermin dalam wujud meningkat dan berkembangnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat.

- 1) Semakin meningkatnya prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial.
- 2) Semakin melembaganya usaha kesejahteraan sosial yang mampu menjangkau sasaran program yang lebih luas.
- 3) Terpelihara dan berkembangnya system nilai sosial budaya yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.⁸⁸

3. Struktur Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Struktur merupakan hal yang penting untuk sebuah organisasi hal ini dikarenakan struktur merupakan landasan atau dasar kerja aturan dan gambaran nyata akan pembagian tugas pekerjaan sehingga terciptalah kerjasama yang teratur dan sistematis. Struktur ini merupakan landasan atau dasar kerja dimaksudkan agar mereka melaksanakan tugasnya dapat terarah dan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan juga untuk menanamkan sifat tanggung jawab terhadap tugasnya dan sebagai acuan kemana mereka harus berkonsultasi bila terjadi permasalahan didalam pekerjaan mereka.⁸⁹

Adanya pembagian tugas, kemudahan dalam melakukan pekerjaan

⁸⁸ *Dokumentasi*, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dicatat tanggal 20 mei 2019.

⁸⁹ *Dokumentasi*, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dicatat tanggal 10 mei 2019.

sehari-hari didalam pelaksanaan tugas dapat terjadi sehingga koordinasi antara atasan dan bawahan akan terlaksana. Penentuan tugas dan tanggung jawab ini dapat diketahui melalui struktur yang ada diorganisasi. Tugas dan tanggung jawab seorang pekerja dapat dilihat dari struktur yang ada telah ditentukan oleh badan organisasi tersebut.

Adapun struktur organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung:⁹⁰

1. Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Secretariat :

- 1) Sub bagian program dan informasi
- 2) Sub bagian umum dan kepegawaian
- 3) Sub bagian keuangan dan asset

c. Bidang Pemberdayaan sosial:

- 1) Seksi kelembagaan dan pemberdayaan dan kelembagaan
- 2) Seksi pembedayagunaan sumber dana sosial
- 3) Seksi kepahlawanan

d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial:

- 1) Seksi pelayanan sosial anak dan rehabilitasi penyandang cacat
- 2) Seksi pelayanan rehabilitasi tuna sosial
- 3) Seksi fasilitas dan rehabilitasi korban narkoba

e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial:

- 1) Seksi bantuan sosial korban bencana alam dan sosial
- 2) Seksi penanggulangan korban tindak kekerasan

⁹⁰ *Dokumentasi*, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dicatat 10 Mei 2019.

3) Seksi bantuan fakir miskin dan jaminan sosial

f. Bidang Kesejahteraan Sosial:

1) Seksi permakamah

2) Seksi data informasi

3) Seksi keagamaan

g. Unit Pelaksana Teknis

h. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Bagian struktur organisasi Dinas Sosial kota Bandar Lampung sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.⁹¹

B. Gambaran Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung

Kota bandar Lampung merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung dan terletak di wilayah yang strategis karena provinsi Lampung merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar pulau sumatra dan pulau jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan kota bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri, dan pariwisata. Oleh karena itu tidak mengherankan jika banyak masyarakat dari kota luar kota bandar Lampung yang mencoba peruntungan di kota. Hal ini menyebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk di kota bandar Lampung, pertumbuhan yang tinggi tetapi tidak disertai dengan tingkat kesejahteraan yang baik menyebabkan banyak warga yang hidup dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu pemicu munculnya masalah sosial salah satunya yaitu

⁹¹ Dokumentasi, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dicatat tanggal 10 Mei 2019.

penyandang disabilitas yang tidak mempunyai mata pencarian sehingga penyandang disabilitas banyak yang menjadi pengemis, pengamen, gelandangan dikota Bandar Lampung memang salah satu fenomena yang menjadi perhatian pemerintah daerah, karena faktor kemiskinan yang terjadi pada penyandang disabilitas disebabkan mereka susahny mendapatkan kehidupan yang layak dikarenakan mereka mempunyai kekurangan sehingga terjadilah masalah sosial karna tidak cukupnya perekonomian untuk kehidupan mereka sehari-hari.⁹²

Selain disebabkan kemiskinan terjadinya penyandang disabilitas yang terlantar masalah lain yang terjadi karena keluarganya yang tidak menginginkan mereka dan menelantarkan mereka secara sengaja, seorang penyandang disabilitas yang sejak lahir maupun disebabkan karna kecelakaan sehingga membuat mereka mempunyai kekurangan fisik maupun mental sangat rawan untuk ditelantarkan dan diperlakukan salah.

Penyandang disabilitas adalah orang yang mempunyai kekurangan dan keterbatasan dalam fisik maupun mental yang sering disebut juga penyandang cacat, penyandang cacat juga terbagi menjadi beberapa yaitu penyandang cacat fisik maupun penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, dan kemampuan berbicara. Cacat fisik antara lain: cacat kaki, cacat punggung, cacat tangan, cacat netra, cacat rungu, cacat wicara, cacat raba (rasa), dan cacat pembawaan. Penyandang cacat mental adalah kelainan mental dan atau tingkah laku,

⁹² Muzarin, wawancara dengan kepala Rehabsos Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 10 Mei 2019.

baik cacat bawaan atau akibat dari penyakit, cacat mental antara lain: gangguan psikiatrik fungsional.⁹³

Untuk daerah kota Bandar Lampung sendiri pada tahun 2017 terdapat 897 jiwa penyandang disabilitas, pada tahun 2018 terdapat 1104 jiwa penyandang disabilitas dan pada tahun 2019 berjumlah 974 jiwa penyandang disabilitas dari 18 kecamatan yang ada di Bandar Lampung.⁹⁴ Untuk lebih jelasnya jumlah penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung, sebagaimana terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel.1

Jumlah Penyandang Disabilitas Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah
1	Bumi Waras	40
2	Enggal	38
3	Kedamaian	30
4	Kedaton	63
5	Kemiling	64
6	Labuhan Ratu	50
7	Panjang	83
8	Rajabasa	49
9	Sukabumi	30
10	Sukarame	28

⁹³ Muzarin, wawancara dengan kepala Rehabsos Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 10 Mei 2019.

⁹⁴ Dokumentasi, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dicatat tanggal 10 Mei 2019.

11	Tanjunga Karang Pusat	70
12	Tanjung Karang Timur	77
13	Tanjung Senang	30
14	Teluk Betung Barat	22
15	Teluk Betung Selatan	25
16	Teluk Betung Utara	31
17	Teluk Betung Timur	89
18	Wayhalim	78
Jumlah		897

Tabel.2

**Jumlah Penyandang Disabilitas
Tahun 2018**

No	Kecamatan	Jumlah
1	Bumi Waras	50
2	Enggal	55
3	Kedamaian	35
4	Kedaton	85
5	Kemiling	70
6	Labuhan Ratu	67
7	Panjang	80
8	Rajabasa	46
9	Sukabumi	36
10	Sukarame	26

11	Tanjunga Karang Pusat	90
12	Tanjung Karang Timur	63
13	Tanjung Senang	35
14	Teluk Betung Barat	70
15	Teluk Betung Selatan	74
16	Teluk Betung Utara	83
17	Teluk Betung Timur	67
18	Wayhalim	72
Jumlah		1104

Tabel.3

**Jumlah Penyandang Disabilitas
Tahun 2019**

No	Kecamatan	Jumlah
1	Bumi Waras	30
2	Enggal	40
3	Kedamaian	30
4	Kedaton	80
5	Kemiling	63
6	Labuhan Ratu	60
7	Panjang	90
8	Rajabasa	31
9	Sukabumi	36
10	Sukarame	21

11	Tanjunga Karang Pusat	87
12	Tanjung Karang Timur	88
13	Tanjung Senang	39
14	Teluk Betung Barat	42
15	Teluk Betung Selatan	34
16	Teluk Betung Utara	42
17	Teluk Betung Timur	73
18	Wayhalim	78
Jumlah		974

C. Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan Jaminan Sosial

Peran merupakan sesuatu yang diharapkan kedepannya dapat memberi pengaruh pada seluruh masyarakat atau lingkungan yang dilakukan oleh seseorang karena status atau kedudukan yang dimilikinya. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam pemabangunan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk terwujudnya tata kehidupan dan penghidupan yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha dan memenuhi kehidupan hidup, baik perorangan, keluarga, kelompok, dan komunitas masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta nilai sosial budaya yang tercermin guna dalam wujud meningkatkan dan berkembangnya kualitas kehidupan yang layak dan bermatabat. Dinas Sosial dalam program kesejahteraan sosial terbagi menjadi dalam 4 bagian, yaitu: Rehabilitasi Sosial, Bantuan Jaminan Sosial, Pemberdayaan

Sosial, dan Perlindungan Sosial.⁹⁵

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan penyandang disabilitas di kota Bandar Lampung adalah tentang terdapatnya hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan jaminan sosial yang semestinya untuk mencapai hidup yang sejahtera. Dalam artian bahwa penyandang disabilitas masih mengalami tantangan untuk memperoleh bantuan khusus, bantuan berkelanjutan, aksesibilitas, pekerjaan, kehidupan yang layak dan lain-lainnya. Hak penyandang disabilitas masih belum secara khusus diperhatikan, misalnya dalam hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih minim sarana pelayanan sosial, maupun jaminan sosial, dimana sebagian besar hambatan aksesibilitas tersebut berupa hambatan yang membuat para penyandang disabilitas kesulitan dalam mendapatkan jaminan sosial.⁹⁶ Maka dari itu Dinas Sosial berupaya menjalankan tugasnya masing-masing demi untuk memenuhi kewajibannya sebagai instansi pemerintah yang berkewajiban.

Dinas sosial mempunyai 4 program yaitu Bantuan Jaminan Sosial, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial. Dinas Sosial dalam Bantuan Jaminan Sosial terdapat 2 bentuk bantuan, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pinjam Non Tunai (BPMT). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat Kepada Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat sebagai upaya percepatan

⁹⁵ Santosi Adhi, *Wawancara* Kepala Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 10 Mei 2019.

⁹⁶ Santosi Adhi, *Wawancara* Kepala Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 10 Mei 2019.

penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH Sebagai program bantuan sosial bersyarat PKH membuka akses keluarga miskin terutama untuk ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan, fasilitas layanan pendidikan yang tersedia disekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, kepada penerima manfaat didorong untuk memiliki akses dan menfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan, dan pendampingan termasuk akses terhadap berbagai program secara berkelanjutan. Program Keluarga Harapan diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan.⁹⁷

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol samapai enam tahun, lanjut usia mulai dari 60 tahun, dan penyandang disabilitas fisik maupun penyandang disabilitas mental dan yang lebih diutamakan penyandang disabilitas berat. Penyandang disabilitas yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan ini hanyalah penyandang disabilitas yang tidak mempunyai penghasilan, penyandang disabilitas yang tidak lagi mempunyai keluarga, penyandang disabilitas yang diutamakan penyandang disabilitas berat, seperti kecacatan pada anggota tubuh baik sejak lahir maupun dikarenakan

⁹⁷ Dokumentasi, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dicatat 10 Mei 2019.

kecelakaan, kemudian penyandang disabilitas tuna netra. Penyaluran bantuan jaminan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ini telah diselenggarakan sejak 2007, dan diberikan kepada penerima manfaat yang ditetapkan oleh direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Komponen bantuan dan indeks bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), sebagai berikut:

1. Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Rp.1.890.000
2. Bantuan Lanjut Usia Rp. 2.000.000
3. Bantuan Penyandang Disabilitas Rp. 2000.000⁹⁸

Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung guna menjalankan tugasnya dalam bentuk jaminan sosial bagi penyandang disabilitas ini dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai sesuatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya untuk mempengaruhi, mengarahkan dan menggerakkan perilaku penyandang disabilitas untuk bekerja bersama-sama mencapai tujuan yang dikehendaki bersama. Jaminan sosial terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung guna untuk mencapai kehidupan yang sejahtera sehingga penyandang disabilitas tidak lagi bergantung pada orang lain dalam bentuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Program tersebut gunanya untuk membantu biaya kehidupan penyandang disabilitas yang dapat dikategorikan kurang mampu atau tidak mempunyai penghasilan. Bantuan ini dilakukan untuk penyandang disabilitas berupa bantuan berkelanjutan yang dilakukan oleh Dinas Sosial sesuai dengan putusan pemerintah yang telah ditetapkan, bantuan tersebut berupa uang

⁹⁸ *Dokumentasi*, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dicatat 10 Mei 2019.

sebesar Rp.2.000.000 dalam setahun yang diberikan dalam 4 kali pembagian yang artian dalam 3 bulan sekali dibagikan, dalam 1 kali pembagian sebesar Rp.500.000. untuk perorangnya, Program Keluarga Harapan untuk di Kota Bandar Lampung ini telah berjalan sejak tahun 2011 hingga tahun 2019 sekarang. Dapat dilihat pada data dibawah ini jumlah penyandang disabilitas yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan sejak 3 tahun belakangan pada tahun 2017 hingga 2019, sebagai berikut: ⁹⁹

Tabel.4

**Jumlah Penerima Bantuan
Program Keluarga Harapan
2017-2019**

No	Tahun	Jumlah	Seharusnya	Persentase
1	2017	285	897	25%
2	2018	342	1104	37%
3	2019	224	974	21%

Berdasarkan data diatas bahwa setiap tahunnya mengalami perubahan jumlah penyandang disabilitas yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan, dan Setiap tahunnya pembagian dana tersebut tidaklah selalu sama meskipun sama dalam 4 kali periode, seperti pada tahun 2017 pembagian dana pada bulan Januari, April, Juli, Oktober. Pada tahun 2018 pembagian dana pada bulan Febuari, Maret, Agustus, November. Dan berganti lagi pada tahun 2019 ini dibulan Januari, April,

⁹⁹ Dokumentasi, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dicatat 10 Mei 2019.

Juli, Oktober.¹⁰⁰

Untuk penyandang disabilitas yang ada di daerah Kota Bandar Lampung yang terdapat 18 kecamatan pada tahun 2019 ini terdapat 974 jiwa, Namun yang mendapatkan Bantuan Program Keluarga Harapan hanya 224 jiwa saja karena tidak semuanya dapat menerima bantuan PKH. dapat dilihat jumlah penyandang disabilitas yang menerima bantuan masing-masing pada 18 kecamatan di Kota Bandar Lampung dalam tabel sebagai berikut:¹⁰¹

Tabel.5

**Jumlah Penyandang Disabilitas yang
Menerima Bantuan Program Keluarga Harapan
di Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2019**

No	Kecamatan	Jumlah
1	Bumi Waras	12
2	Enggal	5
3	Kedamaian	1
4	Kedaton	11
5	Kemiling	8
6	Labuhan Ratu	2
7	Panjang	23
8	Rajabasa	9
9	Sukabumi	8
10	Sukarame	1

¹⁰⁰ Dokumentasi, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dicatat 10 Mei 2019.

¹⁰¹ Dokumentasi, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dicatat 10 Mei 2019.

11	Tanjunga Karang Pusat	37
12	Tanjung Karang Timur	26
13	Tanjung Senang	10
14	Teluk Betung Barat	12
15	Teluk Betung Selatan	13
16	Teluk Betung Utara	28
17	Teluk Betung Timur	8
18	Wayhalim	10
Jumlah		224

Berdasarkan pada diatas jumlah penyandang disabilitas yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan pada tahun 2019 terdapat 224 jiwa, dalam 224 jiwa penyandang disabilitas terdapat Laki-Laki dan Wanita, dapat dilihat pada Tabel sebagai Berikut:¹⁰²

Tabel.6

**Jenis Kelamin Penerima Bantuan
Program Keluarga Harapan Kota Bandar Lampung**

No	Kecamatan	Jumlah Perempuan	Jumlah Laki-Laki
1	Bumi Waras	7	5
2	Enggal	3	2
3	Kedamaian	1	0
4	Kedaton	8	3
5	Kemiling	3	5

¹⁰² Dokumentasi, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dicatat 10 Mei 2019.

6	Labuhan Ratu	2	0
7	Panjang	9	14
8	Rajabasa	5	4
9	Sukabumi	5	3
10	Sukarame	1	0
11	Tanjunga Karang Pusat	16	21
12	Tanjung Karang Timur	12	14
13	Tanjung Senang	5	5
14	Teluk Betung Barat	5	7
15	Teluk Betung Selatan	11	4
16	Teluk Betung Utara	18	10
17	Teluk Betung Timur	6	2
18	Wayhalim	5	5
Jumlah		121	103

Dinas sosial dengan memberikan bantuan PKH agar penyandang disabilitas ini gunanya untuk dapat terbantu keuangannya dan dapat juga untuk menjadikan sumber modal untuk mereka melakukan pekerjaan dan tidak terpaku hanya mengharpakan terhadap bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diadakan oleh Pemerintah tersebut, sehingga mampu menjalankan peranan dan tugas kehidupannya dan tidak terjatuh dalam keadaan dan kondisi lemah atau terpinggirkan sehingga menjadi masalah

sosial seperti pengamen, gelandang dan pengemis dan lain-lain.¹⁰³

Dalam dibentuknya Program Keluarga Harapan (PKH) ini Dinas Sosial Kota Bandar Lampung mensosialisasikan kepada masyarakat melalui ketua lingkungan masing-masing yang sudah mempunyai data anggota masyarakatnya dan dapat memilih masyarakat mana yang berhak menerima bantuan tersebut, dan untuk penyandang disabilitas itu sendiri tidaklah mereka langsung yang diberikan sosialisasi melainkan melalui pendampingnya seperti, ibu, bapak, kaka, adik, keluarga, ataupun tetangga mereka yang dapat menjadi pendamping mereka.¹⁰⁴

Selain bantuan Program Keluarga Harapan ada juga Bantuan Pinjam Non Tunai (BPMT), Sistem ini penyaluran baru dalam bantuan pangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai. Bantuan sosial non tunai ini diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi bantuan dan jaminan sosial. Program ini juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan formal diperbankan. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat dinilai lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Dalam Bantuan Pinjam Non Tunai (BPMT) ini menggunakan kartu elektronik yang dimaksud dapat digunakan untuk memperoleh beras, telur, dan bahan pokok lainnya diwarung, dipasar, ditoko, sesuai harga yang berlaku. Untuk menyalurkan bantuan sosial non tunai ini diawali

¹⁰³ Elvira Yusna Murti dan Cucu Purwanto, *Wawancara Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung*, 10 Mei 2019.

¹⁰⁴ Elvira Yusna Murti dan Cucu Purwanto, *Wawancara Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung*, 10 Mei 2019.

dengan pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial yang telah didata dan diseleksi berhak atau tidak untuk mendapatkan Bantuan Pinjam Non Tunai adalah katagori yang dapat dibilang tidak mampu atau miskin. calon KPM akan mendapat surat pemebritahuan berisi teknis pendafrtran ditempat yang telah ditentukan, data yang telah diiisioleh calon penerima program ini lalu akan diproses oleh bank yang telah bergabung dalam himpunan bank milik Negara (Himbara), setelah itu dari bank akan dibuatkan rekening dibank dan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebaagai kartu non tunai untuk mengambil bantuan.¹⁰⁵

D. Pelaksanaan Jaminan Sosial di Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data yang diperoleh pada dinas sosial kota bandar lampung bahwa diKecamatan Kemiling terdapat 8 jiwa penyandang disabilitas yang terdaf menerima bantuan Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.¹⁰⁶

1. Daftar Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan diKecamatan Kemiling

Berdasarkan data yang diperoleh pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung penerima bantuan Program Keluarga Harapan dapat dilihat berdasarkan Nama, Jenis Kelamin dan Usia dalam tabel sebagai berikut:

¹⁰⁵ Elvira Yusna Murti, *Wawancara Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung*, 10 Mei 2019.

¹⁰⁶ *Dokumentasi*, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, dicatat 10 Mei 2019.

Tabel.7

**Daftar Penerima BantuanProgram Keluarga Harapan
Kecamatan Kemiling**

No	Nama	Jenis Kelamin P/L	Usia
1	Sri Wati	P	48
2	Titin	P	48
3	Lastri	P	50
4	Wagiyo	L	53
5	Samidi	L	49
6	Mulyaman	L	52
7	Singgih Tri Handoyo	L	45
8	Irfan	L	47

**2. Daftar Tempat Tinggal Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan
diKecamatan Kemiling**

Kecamatan Kemiling terdapat 9 Kelurahan, yaitu Kelurahan Sumber Rejo, Kelurahan Beringin Raya, Kelurahan Kedaung, Kelurahan Pinang Jaya, Kelurahan Sumber Agung, Kelurahan Beringin Jaya, Kelurahan Kemiling Permai, Kelurahan Kemiling Raya, Kelurahan Rejo Sejahtera, Berdasarkan data tempat tinggal penerima bantuan Program Keluarga Harapan yang terdapat pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel.8

**Daftar Tempat Tinggal Penerima Bantuan
Program Keluarga Harapan Kecamatan Kemiling**

No	Nama	Kelurahan
1	Sri Wati	Kemiling Permai
2	Titin	Sumber Rejo
3	Lastri	Sumber Rejo
4	Wagiyo	Kemiling Permai
5	Samidi	Sumber Rejo
6	Mulyaman	Pinang Jaya
7	Singgih Tri Handoyo	Kemiling Permai
8	Irfan	Pinang Jaya

3. Cacat yang diAlami Oleh Penyandang Disabilitas yang menerima Bantuan Program Keluarga Harapan diKecamatan Kemiling

Penyandang Disabilitas sering disebut juga dengan penyandang cacat, penyandang cacat yang berarti orang tersebut mempunyai kelainan fisik maupun mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan atau hambatan baginya untuk melakukan sesuatu selayaknya, berdasarkan data penyandang disabilitas diKecamatan Kemiling terdapat berbagai macam Penyandang cacat yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.9

Jenis Penyandang Disabilitas yang Menerima Bantuan Program Keluarga Harapan Kecamatan Kemiling

No	Nama	Cacat yang di Alami
1	Sri Wati	Tuna Daksa
2	Titin	Tuna Daksa
3	Lastri	Tuna Netra
4	Wagiyo	Tuna Netra
5	Samidi	Tuna Netra
6	Mulyaman	Tuna Wicara
7	Singgih Tri Handoyo	Tuna Daksa
8	Irfan	Tuna Netra

Berdasarkan data tersebut diatas, bahwa penyandang disabilitas yang terdapat diKecamatan Kemiling berbagai macam kecacatan yang di alami, kecacatan yang di alami mereka ada yag sejak lahir dan ada pula yang dikarnakan kecelakaan.¹⁰⁷

4. Daftar Pekerja Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan diKecamatan Kemiling

Pekerjaan merupakan salah satu yang sangat paling penting dalam kehidupan manusia, dikarenakan melalui pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia ia dapat menghasilkan sesuatu, maka dari itu dapat dilihat bahwa penyandang disabilitas pada kecamatan Kemiling mempunyai

¹⁰⁷ Wawancara kepada Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan, 24 Juni 2019

pekerjaan, seperti yang disebutkan dalam tabel sebagai berikut:¹⁰⁸

Tabel.10

**Penyandang Disabilitas
Penerima Bantuan PKH Kecamatan Kemiling**

No	Nama	Pekerjaan
1	Sri Wati	Tidak Bekerja
2	Titin	Pengamen
3	Lastri	Pengamen
4	Wagiyo	Pengamen
5	Samidi	Tukang Urut
6	Mulyaman	Buruh
7	Singgih Tri Handoyo	Tidak Bekerja
8	Irfan	Tukang Urut

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Kemiling mayoritas menjadi Pengamen dan tidak bekerja yang disebabkan mereka tidak mempunyai bekal yang mereka pandai, hanya beberapa yang dapat bekerja menjadi tukang urut dan buruh dipasar-pasar.

**5. Penerimaan Bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan
Kemiling**

Pada data yang diperoleh di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
Bahwa nama-nama penyandang disabilitas yang terdaftar pada Dinas

¹⁰⁸ Wawancara kepada Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan, 24 Juni
2019

Sosial Kota Bandar Lampung ini menerima bantuan Program Keluarga Harapan, namun hasil survei dilapangan bahwa ada penyandang disabilitas yang tidak sama sekali menerima bantuan PKH, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel.11

**Penerimaan Bantuan Program Keluarga Harapan
sejak Tahun Berapa hingga Tahun Berapa**

No	Nama	Menerima Bantuan PKH
1	Sri Wati	2019
2	Titin	Tidak Pernah
3	Lastri	Tidak Pernah
4	Wagiyo	2018
5	Samidi	2017-2018
6	Mulyaman	Tidak Pernah
7	Singgih Tri Handoyo	2017-2019
8	Berdasarkan data yang diperoleh di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	2019

Berdasarkan data yang diperoleh di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung bahwa 8 Penyandang Disabilitas yang

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa hasil dari wawancara kepada penyandang disabilitas yang namanya terdaftar pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, bahwa sebagian menyatakan tidak sama sekali menerima bantuan tersebut. Penyandang disabilitas yang tergolong tidak mampu malah ia tidak sama sekali menerima bantuan Program Keluarga Harapan dan bantuan berupa apapun itu hanya ada beberapa penyandang disabilitas yang diberi pelatihan pekerjaan, sedangkan

Penyandang disabilitas yang masih mempunyai keluarga dan keluarganya pun masih mampu untuk memenuhi biaya kehidupannya yang dapat digolongkan mampu semestinya tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan, namun beliau mendapatkan bantuan tersebut sejak tahun 2017 hingga saat ini 2019.¹⁰⁹

Pernyataan dari Ibu titin bahwa beliau tidak mengetahui adanya bantuan yang diadakan oleh dinas sosial Kota Bandar Lampung, dan tidak ada juga dari kepala lingkungannya yang mendata keluarganya dalam penerimaan bantuan Program Keluarga Harapan.¹¹⁰ Pernyataan dari Ibu Lastri bahwa beliau sudah pernah didata oleh kepala lingkungan dan kepala lingkungan mengatakan bahwa akan mendapatkan bantuan dari dinas sosial kota Bandar Lampung namun sampai saat ini beliau tidak menerima bantuan berupa apapun dari dinas sosial Kota Bandar Lampung.¹¹¹ Pernyataan Bapak Mulyaman bahwa beliau tidak mengetahui bahwa datanya terdaftar dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan, hanya saja kepala lingkungannya pernah mendata dirinya namun beliau tidak mengetahui bahwa datanya untuk didaftarkan penerima bantuan Program Keluarga Harapan.¹¹²

¹⁰⁹ Wawancara kepada Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan, 24 Juni 2019

¹¹⁰ Wawancara kepada Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan, 24 Juni 2019

¹¹¹ Wawancara kepada Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan, 24 Juni 2019

¹¹² Wawancara kepada Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan, 24 Juni 2019

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan Tugas Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Menyelenggarakan Jaminan Sosial

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan rakyat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 42 bahwa “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik, atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Pasal 90 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan Kesejahteraan sosial Meliputi : a) Rehabilitasi Sosial, b) Jaminan Sosial, c) Pemberdayaan Sosial, d) Perlindungan Sosial. Dalam pasal 91 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi “pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”. Maka dari itu Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang diperlakukan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial

yang disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi: Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial .

Dinas sosial dalam pelaksanaan pada bidang kesejahteraan khususnya dalam bidang Jaminan Sosial pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2014 dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa: *Satu*, Jaminan Sosial adalah skema kelembagaan untuk menjamin seluruh masyarakat agar dapat memnuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. *Dua*, Jaminan Sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (satu) dimaksud untuk: a.menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia, penyandang cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. b.menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya. *Tiga*, Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (satu) dan (dua) dapat diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 telah melaksanakan Program Keluarga Harapan tersebut, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sudah diupayakan dan direalisasikan di Kota Bandar Lampung sejak tahun 2011 hingga saat ini 2019. Pada dasarnya Penyandang disabilitas bukanlah aib dan berhak mendapatkan perhatian yang sama dengan masyarakat normal lainnya.

Penyandang disabilitas yang tergolong warga tidak mampu saat ini masih menghadapi persoalan yang berkenaan dengan kesejahteraan mereka, dilihat dari kurang layakannya kehidupan untuk penyandang disabilitas yang masih terbilang sangat tergolong rendah, dikarenakan penyandang disabilitas yang mempunyai keterbatasan fisik maupun keterbatasan mental sehingga sangat minim bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka yang layak, jangankan mereka penyandang disabilitas, masyarakat yang normal atau tidak mempunyai keterbatasan fisik maupun mentalpun tidaklah semua mereka dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya agar hidup sejahtera. Sehingga dinas sosial harus maksimal dalam menjalankan tugasnya dalam program yang sedang dijalankan yaitu memberikan bantuan jaminan sosial dalam bentuk Program Keluarga Harapan yang dilakukan oleh Dinas Sosial seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dinas Sosial dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial dalam bentuk Program Keluarga Harapan telah berupaya di upayakan kepada penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung, dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat yang tidak mampu, penyandang disabilitas yang akan menerima bantuan telah di Data terlebih dahulu oleh kepala lingkungan masing-masing yang berhak untuk menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, Sosialisasi yang diberikan pengarahannya mengenai Program Keluarga Harapan, Maka dari itu upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung memberikan bantuan guna untuk mengurangi resiko yang akan terjadi

dimasyarakat dengan memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan, yang dimana dalam bentuk bantuan PKH tersebut berupa uang sebesar Rp.2.000.000 yang dibagikan selama 1 tahun dalam 4 kali pembagian. Tetapi jika difikir secara logika uang Rp.2.000.000 yang dibagikan selama 1 tahun dalam 4 kali pembagain yang berarti selama 3 bulan sekali penyandang disabilitas itu menerima bantuan sebesar Rp.500.000 tidak cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka, jangankan untuk dalam jangka waktu 3 bulan , dalam jangka waktu 1 bulan biaya kehidupan mereka tidak tercukupi dikarenakan penyandang disabilitas itu orang yang mempunyai kekurangan sehingga mereka tidak bisa mencari penghasilan yang cukup dan apabila mereka hidup sendirian atau tidak mempunyai keluarga lagi maka dari mana lagi bisa terbantu untuk kehidupan mereka.

Maka dari itu dana yang diberikan pemerintah kurang besar untuk membantu biaya kehidupan penyandang disabilitas. Oleh karena itu untuk diKota Bandar Lampung masih belum maksimal dikarenakan uang yang diberikan oleh Dinas Sosial belumlah cukup untuk membiayayai kehidupan mereka walaupun uang yang diberikan sudah ketentuan dari Pemerintah, dan kurangnya penyuluhan tentang Program Keluarga Harapan (PKH) tentang adanya bantuan untuk penyandang disabilitas tersebut sehingga tidak semua penyandang disabilitas mengetahui adanya bantuan berkelanjutan untuk mereka yang tidak mampu atau tidak mempunyai penghasilan dikarenakan diluar sana terutama dijalan-jalan

masih banyak penyandang disabilitas yang tidak mengetahui adanya bantuan PKH tersebut.

Hasil wawancara pada kecamatan kemiling yang terdata pada penerima Bantuan Program Keluarga Harapan, penyandang disabilitas yang terdaftar pada dinas sosial yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kemiling tersebut terdapat 8 Jiwa Penyandang Disabilitas, dalam 8 Jiwa penyandang Disabilitas hanya 5 Jiwa saja yang menyatakan bahwa menerima bantuan Program Keluarga Harapan dan 3 Jiwa menyatakan tidak pernah menerima bantuan tersebut, maka dari itu dana bantuan yang semestinya diterima oleh penyandang disabilitas yang berhak menerima bantuan tersebut namun kenyataannya tidak menerima sedikitpun bantuan yang menjadi hak mereka, sedangkan data mereka terdaftar pada dinas sosial kota Bandar Lampung yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan. Bahkan pernyataan bapak Singgih Tri Handoyo Penyandang disabilitas yang dapat tergolong mampu dan masih mempunyai keluarga mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan tersebut terus menerus dan Penyandang Disabilitas yang tergolong tidak mampu seperti ibu Titin, ibu Lastri, dan bapak Mulyaman tidak mendapatkan bantuan tersebut yang semestinya menerima bantuan.

Dinas sosial Kota Bandar Lampung dalam menjalankan pelaksanaan Program Keluarga Harapan untuk Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung dapat dibilang belum optimal dikarenakan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung masih belum sepenuhnya

menyalurkan hak Penyandang disabilitas yang berhak menerima bantuan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Islam merupakan agama yang universal yang telah disempurnakan Penciptanya, Islam telah memberikan pedoman hidup yang menyeluruh, mencakup semua aspek kehidupan baik berupa jasmani maupun rohani, material maupun spiritual, individu maupun sosial, dan duniawi maupun akhirat. Kiranya tidak salah jika Islam merupakan agama yang sistem hidup menyeluruh yang mencakup aspek, aqidah, akhlak, bahkan masyarakat. Islam sebagai agama yang rahmatan lil'alamin berbicara kepada hati nurani mengenai perintah dan larangan. Misalnya yang berkaitan dengan masyarakat kecil dan penyandang disabilitas atau penyandang cacat, agama tidak membicarakan dari sudut Undang-Undang semata tetapi juga mengetuk kepekaan atau kesadaran hati seseorang. Kepedulian Islam terhadap kecil meliputi seluruh aspek kehidupan mereka, sehingga Islam menganjurkan untuk memperhatikan nasib penyandang disabilitas atau sering disebut juga penyandang cacat.

Islam bukan hanya menjaga undang-undang, tetapi juga menjaga hati nurani sesama manusia, yang artinya pengatasan terhadap nasib mereka bukan semata diserahkan kepada undang-undang saja, tetapi juga diserahkan kepada masyarakat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Perjuangan yang tulus dan ketertiban langsung pemerintah dan masyarakat dalam membenahi kehidupan penyandang disabilitas atau penyandang cacat merupakan kerjasama yang diharuskan untuk saling

menunjang antara lainnya.

Dinas sosial kota bandar lampung merupakan instansi pemerintah yang berkewenangan untuk menangani masalah sosial yang terjadi pada penyandang disabilitas di daerah Kota Bandar Lampung ini. Dinas sosial telah berupaya melaksanakan tugasnya untuk membantu kehidupan penyandang disabilitas, yang berarti dinas sosial tidak membedakan diantara sesama manusia, namun dikarenakan jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kota Bandar Lampung cukup banyak sehingga kurangnya penyuluhan untuk penyandang disabilitas yang ada di Kota Bandar Lampung ini mengetahui bahwa adanya bantuan berkelanjutan untuk penyandang disabilitas yang tidak mampu. Namun dinas sosial juga harus amanah dalam menjalankan tugasnya seperti yang telah diperintahkan oleh pemerintah dan memberikan hak penyandang disabilitas kepada mereka yang berhak menerimanya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang curang dan membedakan umat muslimnya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah : 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ

“wahai orang-orang yang beriman jadilah kalian sebagai penegak keadilan karena allah ketika menjadi saksi dengan adil. dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil”

Maksud dari penjelasan ayat diatas bahwa, Allah menyuruh hambanya menjadi orang yang adil karena Allah maha mengetahui segala perbuatan yang dibuat dan maha melihat segala perbuatan yang dibuat, maka dari itu Allah menyukai orang yang berbuat adil, sesungguhnya orang yang tidak berlaku adil ialah orang yang dzalim dan munafik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang telah direalisasikan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam penyaluran bantuan langsung berkelanjutan dapat dikatakan kurang optimal, dikarenakan penyandang disabilitas yang semestinya menerima bantuan Program Keluarga Harapan berupa dana yang diberikan pemerintah ini banyak yang tidak tersalurkan langsung kepada penyandang disabilitas yang berhak menerimanya.
2. Menurut Hukum Islam Pelaksanaan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam Penyelenggaraan jaminan sosial guna untuk mencapai kesejahteraan bagi penyandang disabilitas merupakan kegiatan yang tidak dilarang dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini disebabkan dalam ketentuan hukum Islam, bahwa manusia dilarang untuk membedakan antara sesama manusia latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakan di antara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya dan negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial terutama untuk penyandang disabilitas yang tidak mempunyai mata pencarian.

B. Rekomendasi

1. Kepada Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung agar penerapan jaminan sosial khususnya Program Keluarga Harapan bagi penyandang disabilitas dilakukan secara berkesinambungan sehingga upaya yang dijalankan lebih maksimal, agar penyandang disabilitas dapat memenuhi hidup yang sejahtera.
2. Bagi petugas dalam Bantuan Jaminan Sosial harus lebih tegas dalam menindak hal memberikan Jaminan Sosial sesuai dengan tugasnya dan lebih mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa diadakannya bantuan Program Keluarga Harapan agar penyandang disabilitas yang berhak menerima bantuan tersebut dapat tau bahwa ada bantuan untuk mereka dan terbantu kehidupannya untuk memenuhi hidup yang sejahtera.
3. Kepada penyandang disabilitas yang tidak menerima bantuan yang diadakan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Bandar Lampung seharusnya melaporkan datanya kepada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung agar ditindak lanjuti oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sehingga Penyandang Disabilitas dapat menerima bantuan jaminan sosial yang diadakan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

A. Buku-Buku

Abdullah, *Kajian Tentang Peran Dinas Sosial Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Kementrian Sosial Republik Indonesia, 2010)

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004)

Alaiddin koto, *Filsafat Hukum Islam* (Rajawali, Jakarta:2013)

Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (PT.Bulan Bintang, Jakarta:1989)

Ahmad Syalaby, *Masyarakat Islam* (Jakarta: Jayamurni, 1961)

Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta:Rineke Cipta, 2000)

A.Zaki Yumani , *Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini* (Jakarta: Lembaga Ilmu-ilmu studi Kemasyarakatan, 1977)

D.Dradjad, *Jaminan Sosial diIndonesia* (Insani: Media Informasi dan Komunikasi Pekerjaan Sosial)

H.B. Sutopo, *Metode Penulisan Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta: UNS Press, 1998)

H.Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta,Raja Grafindo : 2007)

H. Muladi, *Hak Asasi Manusia – Hakekat, Konsep, & Implikasinya dalam Prespektif Hukum & Masyarakat* (PT Refika Aditama, Bandung:2009)

Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* . (Jakarta:Ghalia Indonesia 2002)

Kaelan, M.S *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma 2005)

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta 2008)

Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural* (Lantabora Press, Jakarta: 2005)

M.Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Graha Indonesia, 2002)

Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Amzah 2016)

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994)

Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009)

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, " *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985)

Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015)

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, catatanku 14, (Bandung: Alfabeta 2009)

Sujarweni V, Wiratna, *Metode Penelitian Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014)

Zaeni Asyhadie, *aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia* (Rajawali Pers, Jakarta :2013)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

C. Jurnal dan Skripsi

Akmal Sholeh, *Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia*, (Palastren vol.8 No.2 Desember 2015) diakses pada 20 Januari 2019

Ahmad Nizar Shihab, *Hadirnya Negara diTengah Rakyatnya Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011* (wakil ketua komisi IX DPR RI : 2012) diakses pada 23 Mei 2019

Alimuddin, *Aplikasi Pembaharuan Hukum dalam Teori Socio Legal Studies, DitJen Badan Peradilan*, www.badilag.net, diakses pada tanggal 18 November 2018.
<http://digilib.unila.ac.id/2979/13/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 13 November 2018.

AkhmadSholeh, *Islam danPenyandangDisabilitas: TelaahHakAksebelitas PenyandangDisabilitasdalamSistemPendidikan di Indonesia*,
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/palestrn/article/download/968/882>, diakses pada20 Januari 2019

Atik Wartini, *Jurnal Jaminan Sosial dalam Pandangan Ibnu Hazm dan Relevasinya dengan Pengembangan Jaminan Sosial diIndonesia Vol 2*(Kajian Hukum Islam KMIP, Universitas Yogyakarta : 2014) diakses pada 20 Mei 2019.

Aprilina Pawestri, *Jurnal Hak Penyandang Disabilitas Volume 2* (Universitas Sebelas Maret, Juni 2017)

BunjaminNajmi, *Apa Itu Sosial Jaminan Sosial*
<http://Jamsostek.blogspot.co.id/2010/10/apa-itu-jaminan-sosial.html?m=> di akses pada 20 Januari 2019.

Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah, Vol.17No.2 Tahun 2017, (Jambi: Universitas Batanghari, 2017)

Hafiz, NU ONLINE, Ahad,19 November 2017,
<http://www.nu.or.id/post/read/83401/pandangan-islam-terhadap-penyandang-disabilitas>, diakses pada 20 Januari 2019

Muhammad Jayus, *Jurnal Menggagas Arah Baru Studi Hukum Islam di Indonesia* (Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, Lampung : 2013) [http:// www.ejournal.radenintan.ac.id/Index.php/adalah/article/viewFile/274/434](http://www.ejournal.radenintan.ac.id/Index.php/adalah/article/viewFile/274/434), diakses 27 Agustus 2019

Miftahur Ridho, *Jurnal Pandangan Isam tentang Kesejahteraan Sosial bagi Kelompok Penyandang Disabilitas* (Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah IAIN Samarinda, Samarinda : 2017) diakses pada 20 Mei 2019.

Naerul Edwin Kiky Aprianto, *Kontruksi Sistem Jaminan Sosial dalam*

Perspektif Ekonomi Islam (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto : 2017)

Oca Pawalin, *Skripsi Peran Dinas Sosial Kota Metro dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas* (Universitas Lampung, Lampung : 2017) diakses pada 15 Mei 2019)

Otje Salman, *Pengertian Teori Hukum, Filsafat hukum dan Jurisprudence, Law Community*, <https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/filsafat-hukum/>, diakses pada tanggal 13 November 2018.

Pedoman Ilotentang Pengelolaan Penyandang Disabilitas di Tempat Kerja https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---bangkok/---ilo-jakarta/documents/wcms_218055.diakses pada 20 Januari 2019

Rudy Hendra Pakpahan, *Jurnal Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial* , 23 Juli 2012. <http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/838/263>, diakses pada 14 mei 2019

Zulkarnain Ridlwan, *Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (Rights Of Persons With Disabilities)*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013. Universitas lampung, Lampung, 2013.

D. Wawancara

Cucu Purwanto, *Wawancara Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung*, 10 Mei 2019.

Elvira Yusna Murti, *Wawancara Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Bandar Lampung*, 10 Mei 2019.

Muzarin, *wawancara dengan kepala Rehabsos Dinas Sosial Kota Bandar Lampung*, 10 Mei 2019.

Sri Wati *Wawancara kepada Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan*, 24 Juni 2019

Titin, *Wawancara kepada Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan*, 24 Juni 2019

Lastri, *Wawancara kepada Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan*, 24 Juni 2019

Wagiyo, *Wawancara kepada Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan*, 24 Juni 2019

Samidi, *Wawancara* kepada Penerima Bantuan Program Keluarga
Harapan, 24 Juni 2019

Mulyaman, *Wawancara* kepada Penerima Bantuan Program Keluarga
Harapan, 24 Juni 2019

Singgih Tri Handoyo, *Wawancara* kepada Penerima Bantuan Program
Keluarga Harapan, 24 Juni 2019

Irfan, *Wawancara* kepada Penerima Bantuan Program Keluarga
Harapan, 24 Juni 2019



LAMPIRAN



